LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP Tahun 2025

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA







BANDUNG LEBIH BEDAS!

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

WWW.PPID.BANDUNGKAB.GO.ID

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh BAPPERIDA Kabupaten Bandung selama Tahun 2025. Dengan laporan ini, kinerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung dapat tergambar dan terukur, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk pengambilan keputusan mengenai berbagai langkah strategis dimasa yang akan datang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya sebagai perangkat daerah, yang dalam hal ini untuk lebih memperkuat dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan terutama dalam mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan mengenai pencapaian kinerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam periode Tahun 2025. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang ditetapkan, sehingga BAPPERIDA Kabupaten Bandung dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan daerah di Kabupaten Bandung.

Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

Soreang, Februari 2026

BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG

Kepala,

H. MARLAN, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671223 198803 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Tahun Anggaran 2025, BAPPERIDA Kabupaten Bandung mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 32.423.437.072,39- yang terbagi ke dalam 4 (empat) program, 19 kegiatan dan 78 subkegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.517.739.509,- atau 87,95%. Realisasi tersebut menunjukkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung selama Tahun 2025. Capaian kinerja Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

BAPPERIDA Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) dan para pelaksana kebijakan, sehingga BAPPERIDA Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Bandung, dalam melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Pada Tahun 2025 merupakan tahun transisi antara dokumen renstra periode 2021-2026 dan 2025-2029. Dalam renstra periode tahun 2025-2029, Bapperida Kabupaten Bandung berada dalam misi ke-tiga yaitu Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel". Untuk dapat mewujudkan misi tersebut khususnya sasaran "Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel efektif dan efisien", maka harus ditunjang dengan tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Bandung yang dilengkapi dengan indikator yang mendukung dalam pencapaian tersebut. Berdasarkan integrasi penurunan visi dan misi Bupati Terpilih tersebut dirumuskan tujuan jangka menengah Bapperida Kabupaten Bandung yaitu "Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan" dengan indikator tujuannya yaitu "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)" dan "Persentase Kebijakan Berbasis Bukti". Pada indikator tujuan yaitu "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)" dari target **79 poin** teralisasi **81,50 poin** sehingga capaian kinerja sebesar **103,16%,** Untuk indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) pada dokumen Renstra 2025-2029 memiliki Defisini Operasional yang berbeda dengan IPPD pada IKU Dokumen Renstra 2021-2026. Defisini operasional tersebut mengacu pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perhitungan IPPN dengan Definisi Operasional : (Komponen Sinergi) + (Komponen Kualitas Perencanaan) + (Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja) sedangkan pada indikator tujuan yaitu "**Persentase Kebijakan**

Berbasis Bukti" dari target **20%** teralisasi **22,81%** sehingga capaian kinerja sebesar **114,05%**. Secara agregat, **rata-rata capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2025 adalah sebesar 108,61%,** yang menunjukkan bahwa kinerja pada level *outcome strategis* telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara keseluruhan, kinerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik dari sisi *outcome* maupun efisiensi anggaran. Dengan penetapan IKU terbaru periode 2025–2029, BAPPERIDA semakin memperkuat perannya sebagai *leading sector* dalam perencanaan pembangunan daerah yang Berbasis data dan bukti, terintegrasi dan selaras, Inovatif dan implementatif, akuntabel dan transparan.

Selain capaian pada Indikator Kinerja Tujuan, pengukuran kinerja Tahun 2025 juga dilakukan terhadap Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan penjabaran operasional dari tujuan jangka menengah perangkat daerah, Adapun capaian pada level sasaran yaitu untuk **Unsur Perencanaan** terdapat Indikator Kinerja Sasaran "**Indeks SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja"** dari target **24,5 poin** teralisasi **24,48 poin** dengan capaian kinerja sebesar **99,92%,** sedangkan dari **Unsur Riset dan Inovasi** terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yaitu "**Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi"** dari target **4%** terealisasi **4,55%** dengan capaian kinerja sebesar **113,75%, dan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan"** dari target **28,57%** terealisasi **35,22%** dengan capaian kinerja sebesar **123,28%.** Secara keseluruhan, **rata-rata capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 adalah sebesar 112,31%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran strategis. Jika dihitung secara kumulatif antara Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran, maka diperoleh **Total rata-rata capaian kinerja BAPPERIDA Tahun 2025 sebesar 110,83%.** Capaian tersebut mengindikasikan bahwa secara menyeluruh kinerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung berada pada kategori "Sangat Baik", karena seluruh indikator utama melampaui target yang ditetapkan, baik pada level tujuan maupun sasaran**.** Dengan capaian tersebut, BAPPERIDA Kabupaten Bandung semakin siap mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang partisipatif, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Maksud & Tujuan I-3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi I-4
1.4. Sumber Daya Aparatur I-6
1.5. Permasalahan Utama/Isu Strategis I-7
1.6. Sistematika Penyusunan I-8

BAB II PERENCANAAN KINERJA II-9
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... II-12
2.2. Target Anggaran II-13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-15
3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) III-15
3.2. Realisasi Anggaran III-60

BAB IV PENUTUP IV-84
4.1. Kesimpulan IV-84
4.2. Langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Bapperida IV-84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama BAPPERIDA Kabupaten Bandung (Renstra 2021-2026).....	II-11
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama BAPPERIDA Kabupaten Bandung (Renstra 2025-2029).....	II-11
Tabel 2.3	Target Sasaran Startegis BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Renstra 2021-2026).....	II-12
Tabel 2.4	Target Sasaran Startegis BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	II-12
Tabel 2.5	Anggaran Belanja Program, Kegiatan dan Subkegiatan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025.....	II-13
Tabel 3.1	Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025.....	III-16
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bapperida Tahun 2025 (Renstra 2021-2026).....	III-18
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bapperida Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	III-19
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IPPD Tahun 2025.....	III-20
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Capaian IPPD.....	III-21
Tabel 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi IPPD dengan Target Jangka Menengah Renstra Bapperida Tahun 2021-2026.....	III-22
Tabel 3.7	Capaian IPPN Tahun 2020-2023.....	III-23
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IPPD Tahun 2025.....	III-25
Tabel 3.9	Perbandingan Target dan Realisasi IPPD.....	III-25
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra.....	III-26
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi IPPD Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	III-27
Tabel 3.12	Analisis Faktor Penyebab Peningkatan Kinerja IPPD Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	III-30
Tabel 3.13	Alternatif Solusi dan Tindak Lanjut Perbaikan.....	III-31
Tabel 3.14	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja.....	III-33
Tabel 3.15	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2023-2025.....	III-34
Tabel 3.16	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra Bapperida Tahun 2025-2029.....	III-34
Tabel 3.17	Matriks Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Bapperida Tahun 2025.....	III-40
Tabel 3.18	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025.....	III-45
Tabel 3.19	Perkembangan Persentase Kebijakan Berbasis Bukti.....	III-46
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra.....	III-46
Tabel 3.21	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi.....	III-51

Tabel 3.22 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi Tahun 2023-2025 ..... III-51
Tabel 3.23 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi dengan Target Jangka Menengah Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 ..... III-51
Tabel 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan III-52
Tabel 3.25 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Tahun 2023-2025 ..... III-53
Tabel 3.26 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan dengan Target Jangka Menengah Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 ..... III-53
Tabel 3.27 Matriks Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Bapperida Tahun 2025 ..... III-58
Tabel 3.28 Matriks Capaian Indikator Kinerja dengan Capaian Realisasi Keuangan Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025 ..... III-60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Pegawai Bapperida bedasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Grade, Golongan/Pangkat, dan Jabatan.....	I-6
Gambar 3.1	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Bapperida Tahun 2025 dengan Tahun 2024.....	III-21
Gambar 3.2	Tren Perkembangan Nilai AKIP Bapperida Tahun 2023-2025	III-22
Gambar 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai IPPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra.....	III-22
Gambar 3.4	Infografis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan IPPD (Sasaran Program-Sasaran Kegiatan-Subkegiatan).....	III-28
Gambar 3.5	Infografis Upaya Perbaikan Nilai IPPD.....	III-31
Gambar 3.6	Infografis Faktor-Faktor Keberhasilan Capaian Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2025.....	III-35
Gambar 3.7	Infografis Upaya Perbaikan Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja.....	III-37
Gambar 3.8	Infografis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Sasaran Program- Kegiatan-SubKegiatan).....	III-47
Gambar 3.9	Infografis Upaya Perbaikan Persentase Kebijakan Berbasis Bukti.....	III-49
Gambar 3.10	Infografis Faktor-Faktor Keberhasilan Capaian Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi dan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Tahun 2025.....	III-54
Gambar 3.11	Infografis Upaya Perbaikan Capaian Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi dan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan.....	III-56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah memiliki kewajiban meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara melalui pemantapan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna terwujudnya kepemerintahan yang baik (*good governance)* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Atas dasar hal tersebut, untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan,riset dan inovasi daerah, maka BAPPERIDA Kabupaten Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 144 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 274 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 100 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025;
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPERIDA Kabupaten Bandung yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala BAPPERIDA Kabupaten Bandung kepada Bupati Bandung ini telah disusun dan dikembangkan sesuai Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai oleh BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025;
2. Mendorong BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;
3. Sebagai upaya perbaikan pertanggungjawaban kinerja dengan menyajikan informasi mengenai tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BAPPERIDA Kabupaten Bandung dlam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

BAPPERIDA Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok: memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Badan mempunyai sub tugas sebagai berikut:

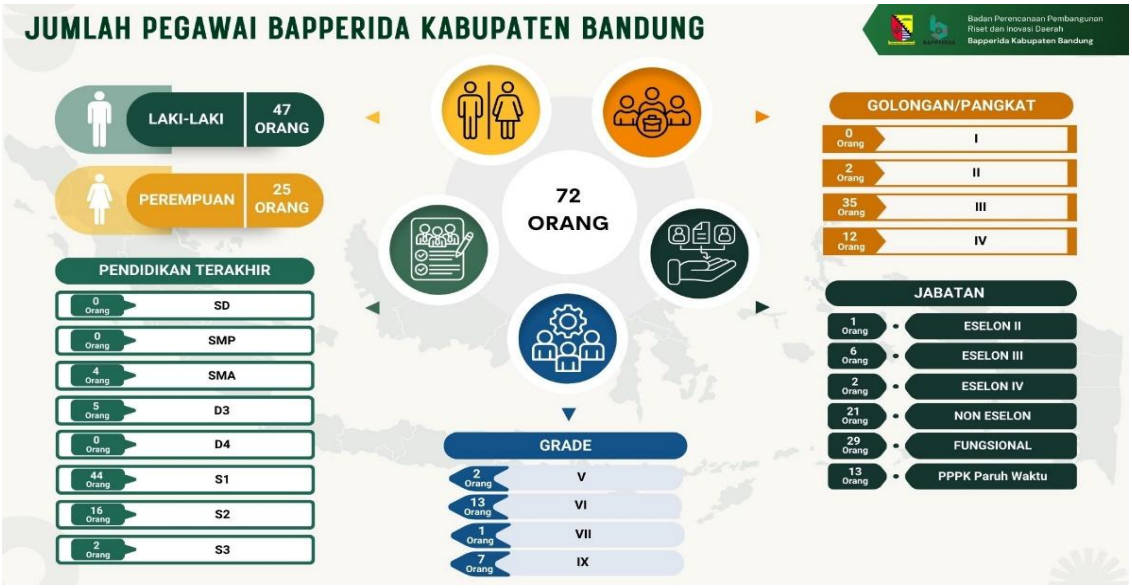
1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Badan yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Riset dan Inovasi berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta dokumen perencanaan Badan;

2. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Ikjip), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Proses bisnis (Probis), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Badan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
3. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
4. Menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
5. Menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Badan;
6. Mendistribusikan tugas kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing;
7. Memantau pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
8. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja Badan;
9. Membina bawahan sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan;
10. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan sebelum ditandatangani;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas Badan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
13. Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Badan; dan
14. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4. Sumber Daya Aparatur

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) BAPPERIDA Kabupaten Bandung merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja.

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bapperida Desember 2025

Gambar 1.1
Jumlah Pegawai Bapperida bedasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Grade, Golongan/Pangkat, dan Jabatan

Menunjukkan bahwa ASN Bapperida Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar didominasi pada jenjang terakhir S1 sebanyak 44 orang yang berimplikasi pada pegawai dengan golongan/pangkat III yang lebih banyak. Jika dilihat dari sebaran pendidikan terakhir jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 16 orang dan S3 sebanyak 2 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya aparatur Bapperida memiliki kualitas yang baik.

1.5. Permasalahan Utama/Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi diantaranya :

1. Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Belum optimalnya pemanfaatan data informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Belum optimalnya pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis Bapperida Kabupaten Bandung adalah Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah, Optimalisasi pemanfaatan data dan penggunaan data yang akurat dan akuntabel, Pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif dan Optimalisasi pemanfaatan data dan hasil riset dan inovasi. Untuk mengatasi isu strategis tersebut maka Bapperida Kabupaten Bandung merumuskan tujuan Perangkat Daerah yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan” dengan indikator tujuannya yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)” dan “Persentase Kebijakan Berbasis Bukti”. Berdasarkan tujuan tersebut Sasaran Bapperida Kabupaten Bandung yaitu “Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan Indikator Sasaran “Indeks SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja” dan “ Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daearh dengan Indikator Sasaran “Persentase Hasil Riset Yang Masuk Dalam Jurnal Terakreditasi” serta “Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan”.

1.6. Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, dan sistematika penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan dan penetapan kinerja serta target anggaran sesuai perjanjian kinerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran kinerja strategis sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi, dan realisasi anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi, untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pada Tahun 2025 merupakan tahun transisi antara dokumen renstra periode 2021-2026 dan 2025-2029. Dalam renstra periode tahun 2025-2029, Bapperida Kabupaten Bandung berada dalam misi ke-tiga yaitu Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel". Untuk dapat mewujudkan misi tersebut khususnya sasaran "Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel efektif dan efisien", maka harus ditunjang dengan tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Bandung yang dilengkapi dengan indikator yang mendukung dalam pencapaian tersebut. Berdasarkan integrasi penurunan visi dan misi Bupati Terpilih tersebut dirumuskan tujuan jangka menengah Bapperida Kabupaten Bandung yaitu **"Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan"** dengan indikator tujuannya **yaitu "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)"** dan **"Persentase Kebijakan Berbasis Bukti".** Pada indikator tujuan yaitu **"Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)"** dari target **79 poin** terealisasi **81,50 poin** sehingga capaian kinerja sebesar **103,16%.** Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) merupakan suatu ukuran atau indeks yang digunakan untuk menilai kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan tersebut. IPPD menilai sejauh mana rencana pembangunan disusun, diintegrasikan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Untuk indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) pada dokumen Renstra 2025-2029 memiliki Definisi Operasional yang berbeda dengan IPPD pada IKU Dokumen Renstra 2021-2026. Definisi operasional tersebut mengacu pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perhitungan IPPN dengan Definisi Operasional: (Komponen Sinergi) + (Komponen Kualitas Perencanaan) + (Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja). Sedangkan pada indikator tujuan yaitu **"Persentase Kebijakan Berbasis Bukti"** adalah indikator yang mengukur proporsi rencana aksi yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah yang mengacu pada data, kajian ilmiah, analisis kebijakan, atau hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Untuk indikator tujuan yaitu Persentase Kebijakan Berbasis Bukti memiliki Definisi Operasional: Jumlah Rencana Aksi Bupati yang didukung oleh Hasil Riset dan Inovasi (Naskah Kebijakan dan lain lain) / Jumlah Rencana Aksi Bupati x 100% dengan target **20%** terealisasi **22,81%** sehingga capaian kinerja sebesar **114,05%**. Secara keseluruhan, kinerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik dari sisi outcome maupun efisiensi anggaran. Dengan penetapan IKU terbaru periode 2025–2029, BAPPERIDA semakin memperkuat perannya sebagai leading sector dalam perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan bukti, terintegrasi dan selaras, Inovatif dan

implementatif, akuntabel dan transparan.

Selain capaian pada Indikator Kinerja Tujuan, pengukuran kinerja Tahun 2025 juga dilakukan terhadap Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan penjabaran operasional dari tujuan jangka menengah perangkat daerah, Adapun capaian pada level sasaran yaitu untuk Unsur Perencanaan terdapat Indikator Kinerja Sasaran **"Indeks SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja"** dari target **24,50** poin teralisasi **24,48** poin dengan capaian kinerja sebesar **99,92%**, sedangkan dari Unsur Riset dan Inovasi terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yaitu **"Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi"** dari target **4%** terealisasi **4,55%** dengan capaian kinerja sebesar **113,75%**, dan **"Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan"** dari target **28,57%** terealisasi **35,22%** dengan capaian kinerja sebesar **123,28%**. **Secara keseluruhan, rata-rata capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025** adalah sebesar **112,31%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran strategis. Jika dihitung secara kumulatif antara Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran, maka diperoleh **Total rata-rata capaian kinerja BAPPERIDA Tahun 2025** sebesar **110,83%.**

Rencana Strategis (Renstra) BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) sebagai konsekuensi dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Tujuan BAPPERIDA Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. *Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal BAPPERIDA*
2. *Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah*
3. *Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah*

Sasaran BAPPERIDA Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. *Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik*
2. *Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah*
3. *Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan*

BAPPERIDA Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 dan 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama BAPPERIDA Kabupaten Bandung (Renstra 2021-2026)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran	1. RPJMD 2. RKPD 3. APBD
		Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas, dan pencapaian dalam dokumen perencanaan	1. RPJMD 2. RKPD 3. RKA/DPA
2	Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang dimplementasikan	Aplikasi APIK

Sumber : Bapperida Desember 2025

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama BAPPERIDA Kabupaten Bandung (Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
I.	**Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan**	**Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)**	1. RPJMD 2. RKPD 3. APBD
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja	SAKIP Kabupaten
		Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	1. RPJMD 2. Rencana Induk Peta Jalan
2	Meningkatnya kualitas hasil riset dan inovasi yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase hasil riset yang masuk dalam jurnal terakreditasi	Sinta kemdiktisaintek
		Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Aplikasi APIK

Sumber : Bapperida Desember 2025

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, BAPPERIDA Kabupaten Bandung telah menetapkan target sasaran kinerja sebagaimana tercantum dalam formulir Perjanjian Kinerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan Renja Perubahan BAPPERIDA Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Target Sasaran Startegis BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025
(Renstra 2021-2026)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	Nilai akuntabilitas kinerja BAPPERIDA	84,55 Point
		Persentase BMD dalam kondisi baik	100%
2	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran	100%
		Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas, dan pencapaian dalam dokumen perencanaan	83,07%
3	Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang dimplementasikan	66,5%

Sumber : Bapperida Desember 2025

Tabel 2.4
Target Sasaran Startegis BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025
(Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
I.	**Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan**	**Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)**	**79**
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja	24,50
		Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	**20**
2	Meningkatnya kualitas hasil riset dan inovasi yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase hasil riset yang masuk dalam jurnal terakreditasi	4,00
		Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	28,57

Sumber : Bapperida Desember 2025

2.2. Target Anggaran

Untuk Tahun 2025, perubahan anggaran BAPPERIDA diperuntukkan untuk mendukung 4 program, 19 kegiatan dan 78 subkegiatan. Adapun 4 program tersebut terdiri dari program pendukung/ kegiatan pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota serta program strategis yang mendukung pada sasaran straegis BAPPERIDA Kabupaten Bandung. Adapun pendanaan untuk program, kegiatn dan subkegiatan terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Anggaran Belanja Program, Kegiatan dan Subkegiatan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025

Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**23.881.163.572,39**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**206.431.500**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**16.005.081.729**
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**6.193.800**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**623.760.000**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**2.335.221.950,39**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.650.381.103**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.528.300.000**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**525.793.490**
	Jumlah 1	**23.881.163.572,39**
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**2.715.626.600**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**1.605.687.200**
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**468.309.400**
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**548.971.600**

Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	92.658.400
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.440.366.700
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	907.019.600
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.174.781.700
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.358.565.400
Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi dan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.386.280.200
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	269.796.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	349.840.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	514.104.500
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.252.539.700
	Jumlah 2	8.542.273.500
	Jumlah 1+2	32.423.437.072,39

Sumber : Bapperida Desember 2025

Anggaran di atas merupakan anggaran perubahan yang terdapat pada dokumen pelaksanaan anggaran perubahan (DPA-P) BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah (Bapperida)

Dalam pencapaian tujuan organisasi pada Renstra 2021-2026 Bapperida Kabupaten Bandung terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis yaitu **"Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Dan Penyelenggara Pelayanan Publik"** dengan indikator sasaran (1) Nilai akuntabilitas kinerja Bapperida dan (2) Persentase BMD dalam kondisi baik; sasaran **"Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah"** dengan indikator sasaran (1) Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran; (2) Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas dan pencapaian dalam dokumen perencanaan serta sasaran **"Meningkatnya Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi yang Diimplementasikan"** dengan indikator kinerja Persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan.

Pertama, sasaran strategis BAPPERIDA Kabupaten Bandung yaitu meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik, dengan realisasi indikator kinerja adalah sebagai berikut : (1). Nilai akuntabilitas kinerja Bapperida sebesar **86,05 Poin**; (2). Persentase BMD dalam kondisi baik sebesar **100%**.

Kedua, sasaran strategis meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan capaian indikator kinerja: (1). Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran sebesar **100%**; (2). Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas dan pencapaian dalam dokumen perencanaan sebesar **84,57%**.

Ketiga, sasaran strategis meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan dengan capaian indikator kinerja: (1) Persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan sebesar **75,30%.**

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator, pencapaian sasaran kinerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai rata-rata persentase capaian sebesar **103,36%.**

Sedangkan dalam renstra periode tahun 2025-2029, tujuan jangka menengah Bapperida Kabupaten Bandung yaitu **"Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan"** dengan **indikator tujuannya yaitu "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)" dan "Persentase Kebijakan Berbasis Bukti"**. Pada indikator tujuan **"Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)"** dari target **79** poin terealisasi **81,50** poin sehingga capaian kinerja sebesar **103,16%,** sedangkan pada indikator tujuan **"Persentase Kebijakan Berbasis Bukti"** dari target **20%** terealisasi **22,81**% sehingga

capaian kinerja sebesar **114,05%.**

Pada capaian indikator kinerja sasaran yaitu **"Indeks SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja"** dari target **24,50** poin terealisasi **24,48** poin dengan capaian kinerja sebesar **99,92%**, sedangkan indikator kinerja sasaran **"Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi"** dari target **4%** terealisasi **4,55%** dengan capaian kinerja sebesar **113,75%**, dan "**Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan"** dari target **28,57%** terealisasi **35,22%** dengan capaian kinerja sebesar **123,28%.** Jika dihitung secara kumulatif antara Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran, maka diperoleh total rata-rata capaian kinerja BAPPERIDA Tahun 2025 sebesar **110,83%.**

Pengukuran kinerja sasaran strategis Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025 dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat outcome. Selain itu pengukuran kinerja mencakup pula beberapa kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, benchmarking, perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan rencana strategis (Renstra). Data kinerja aktual diperoleh dari data perangkat daerah yang disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang kemudian diolah, dievaluasi dan dinalisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yuang relevan dengan rencana strategis.

Pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah terhadap Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung terdapat rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan dan ditindaklanjuti pada dokumen Pelaporan Kinerja selanjutnya. Adapun rencana aksi tindak lanjut terhadap rekomendasi LHE SAKIP Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025

No	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	Peningkatan kompetensi dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimaksudkan agar seluruh pegawai di perangkat daerah seluruhnya bertanggung jawab terhadap kinerja masing-masing dan menyadari pentingnya evaluasi kinerja secara internal. Peningkatan kompetensi ini dapat	Sosialisasi (Workshop) Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Evaluasi Kinerja Internal dengan Inspektorat Daerah	Dokumen Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Evaluasi Kinerja Internal	November	Sekretariat	Selesai

No	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
	dilakukan secara in house training tentang perbaikan budaya kerja atau bekerjasama dengan instansi atau perangkat daerah yang terkait					
2	Pemanfaatan dan implementasi teknologi informasi dalam evaluasi internal yang dapat disisipkan dalam penyusunan SOP Perencanaan Kinerja, SOP Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data akuntabilitas Kinerja	Dokumen SOP Perencanaan Kinerja, SOP Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data akuntabilitas Kinerja	Dokumen SOP Perencanaan Kinerja, SOP Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data akuntabilitas Kinerja	November	Sekretariat	Selesai
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan evaluasi mendalam {in depth evaluation) dan teknik evaluasi dengan berbagai teknik misainya checklist pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana, observasi dan studi dokumentasi serta memanfaatkan semua sumber informasi agar dihasilkan AKIP yang lebih baik.	Sosialisasi (Workshop) Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Evaluasi Kinerja Internal dengan Inspektorat Daerah	Dokumen Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Evaluasi Kinerja Internal	November	Sekretariat	Selesai

Sumber : Bapperida Desember 2025

Tindaklanjut atas rekomendasi tersebut dilaksanakan pada penyusunan dokumen pelaporan kinerja Tahun 2025. Berdasarkan Surat Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga) indikator tujuan dan 5 (lima) indikator sasaran sedangkan IKU Bapperida Tahun 2025-2029 terdiri dari 2 (dua) indikator tujuan dan 3 (tiga) indikator sasaran. Berikut disajikan tabel target dan realisasi indikator kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bapperida
Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)

No.	Tujuan	Sasaran	Tahun 2025					
			Indikator Tujuan/Sasaran	Target		Realisasi		%
1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	Nilai AKIP BAPPERIDA	84,55	Point	86,05	Point	101,77
			Nilai akuntabilitas kinerja BAPPERIDA	84,55	Point	86,05	Point	101,77
			Persentase BMD dalam kondisi baik	100	%	100	%	100,00
2	Meningkatknya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	83,07	%	84,57	%	101,81
			Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran	100	%	100	%	100,00
			Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas, dan pencapaian dalam dokumen perencanaan	83,07	%	84,57	%	101,81
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	66,50	%	75,30	%	113,23
			Persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang dimplementasikan	66,50	%	75,30	%	113,23
Rata-Rata				**86,82**	**%**	**89,18**		**103,36**

Sumber : Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa hasil perhitungan terhadap capaian kinerja sasaran tahun 2025 memiliki rata-rata capaian sebesar **89,18%** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **103,36%**. Adapun capaian dari masing- masing indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bapperida Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
I.	**Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan**	**Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)**	**79**	**81,50**	**103,16%**
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja	24,50	24,48	99,92%
		Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	**20**	**22,81**	**114,05%**
2	Meningkatnya kualitas hasil riset dan inovasi yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase hasil riset yang masuk dalam jurnal terakreditasi	4,00	4,55	113,75%
		Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	28,57	35,22	123,28%
Rata Rata Seluruh Capaian (%Indikator Tujuan+Sasaran) : 5					**110,83%**

Sumber : Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa hasil perhitungan terhadap capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Bapperida tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra 2025-2029 memiliki dengan rata-rata capaian sebesar **110,83%.** Pada indikator tujuan **"Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)"** dari target **79** poin terealisasi **81,50** poin sehingga capaian kinerja sebesar **103,16%,** sedangkan pada indikator tujuan **"Persentase Kebijakan Berbasis Bukti"** dari target **20%** terealisasi **21,67**% sehingga capaian kinerja sebesar **108,35%.**

Pada capaian indikator kinerja sasaran yaitu **"Indeks SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja"** dari target **24,50** poin terealisasi **24,48** poin dengan capaian kinerja sebesar **99,92%**, sedangkan indikator kinerja sasaran **"Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi"** dari target **4%** terealisasi **4,55%** dengan capaian kinerja sebesar **113,75%**, dan "**Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan"** dari target **28,57%** terealisasi **35,22%** dengan capaian kinerja sebesar **123,28%**:

3.1.1 Tujuan 1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah (Indikator : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah) Renstra 2021-2026

Salah satu tujuan strategis Bapperida Kabupaten Bandung yang tercantum dalam dokumen Renstra adalah **"Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembagunan Daerah**" dengan indikator tujuan **"Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah" (IPPD)**. Indeks ini menghitung aspek proses dan kualitas dalam penyusunan dokumen perencanaan serta ketercapaian dari perencanaan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Indikator tujuan ini juga termasuk kedalam salah satu Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bandung. Target Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebesar **83,07%** dengan realisasi **84,57%** dengan capaian **101,81%.**

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IPPD Tahun 2025

Realisasi Capaian IPPD Tahun 2025			
No.	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1.	83,07 Poin	84,57 Poin	101,81%

Sumber : Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Perhitungan nilai IPPD Kabupaten Bandung dapat dihitung menggunakan formulasi:

IPPD = 32,75% (Aspek Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan) + 31,25% (Aspek Kualitas Dokumen Perencanaan) + 36% (Aspek Pencapaian Pembangunan)

Adapun nilai dari masing-masing aspek nya terdiri dari **26,80%** pada Aspek Pencapaian Pembangunan, **29,42%** pada aspek Kualitas Dokumen RKPD dan Aspek Proses Penyusunan Dokumen RKPD sebesar **28,35%**. Pada Tahun 2025 tidak mengakselerasi nilai IPPD Kabupaten Bandung dikarenakan pada Renja Perubahan Tahun 2025 mengakomodir indikator yang berbeda, sehingga tidak dilakukan penyesuaian target pada nilai IPPD Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Untuk melihat perbandingan trend kenaikan atau penurunan capaian kinerja maka realisasi tahun 2025 dibandingan dengan capaian dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024. Adapaun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Capaian IPPD

Perbandingan Realisasi serta capaian kinerja Tahun 2023-2025				
NO	TAHUN 2025		CAPAIAN TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2023
	REALISASI	CAPAIAN		
1	84,57	101,81%	100,04	105,73

Sumber : Pengolahan data Bapperida Desember 2025

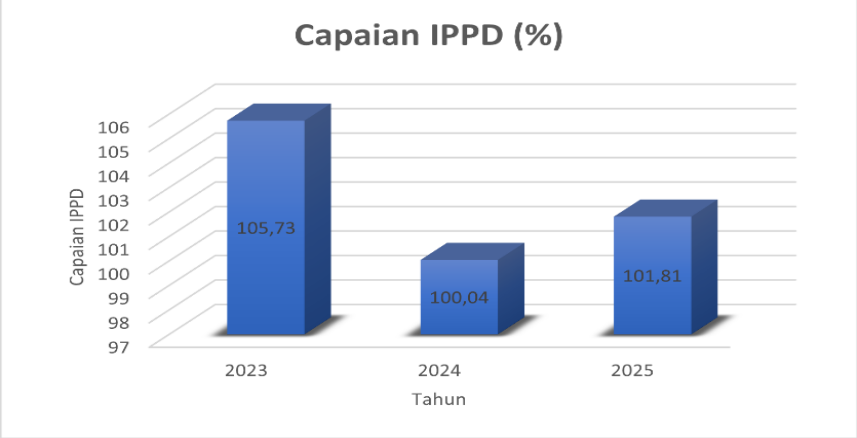
Sandingan realisasi dan capaian kinerja antar periode (Tahun 2025 terhadap Tahun 2024) dijadikan salah satu tolak ukur sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya. Adapun infografisnya tersaji dalam gambar berikut:



Gambar 3.1
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai IPPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Nilai IPPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 menunjukkan kondisi yang baik dengan capaian kinerja sebesar **101.81%** dari target **83,07%** dan terealisasi sebesar **84,57%.** Dari segi realisasi, IPPD Tahun 2025 menurun sebesar **1 poin** dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar **85,57%** dan pada tahun 2025 sebesar **84,57%**. Adapun dari aspek pencapaian kinerja IPPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar **1,77%** dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar **100,04%** dan pada tahun 2025 sebesar **101,81%.** Hal ini disebabkan karena tidak adanya penyesuaian target pada tahun 2025, masih mengacu pada Perjanjian Kinerja-Murni Tahun 2025 dan Renja Perubahan Tahun 2025 mengakomodir indikator yang berbeda

Untuk melihat perbandingan trend kenaikan atau penurunan capaian kinerja maka realisasi tahun 2025 dibandingan dengan capaian dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024. Adapaun perbandingannya adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2
Tren Perkembangan Capaian IPPD Tahun 2023-2025

Untuk dapat memprediksikan atau proyeksi capaian sampai tahun terakhir Renstra, maka capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi IPPD dengan Target Jangka Menengah Renstra Bapperida Tahun 2021-2026

No.	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
1.	83,07%	84,57%	83,77%	100,95%

Sumber : Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Capaian kinerja Nilai IPPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan pada target akhir Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 dengan capaian sebesar **100,95%.**



Gambar 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai IPPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka Menengah, capaian IPPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 sudah melebihi dari target akhir RPJMD yaitu sebesar **100,95%** dari target akhir Renstra sebesar **83,77%** dan terealisasi **84,57%** pada tahun 2025.

Pada pelaksanaannya nilai IPPD Kabupaten Bandung dibandingkan dengan nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Definisi operasional dari nilai IPPN adalah jumlah skor aspek integrasi dengan bobot **45%**, sinkronisasi dengan bobot **35%** dan sinergi **20%**. Secara garis besar perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ini menghitung integrasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan sinergi antara Pembangunan Pusat dan Daerah. Dokumen LKIP Bappenas Tahun 2025 belum dapat diakses atau belum *release* oleh karena itu IPPD Kabupaten Bandung akan dibandingan dengan IPPN Tahun 2023. Target IPPN Tahun 2023 sebesar **90** dengan realisasi **96,41** atau capaian sebesar **107,12%**. Berikut ini perbandingan IPPN Tahun 2020-2023 :

Tabel 3.7
Capaian IPPN Tahun 2020-2023

Tabel 3.29. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2020		2021		2022		2023		Status Realisasi IKSS terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Tujuan – 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	**Indikator Tujuan – 1:** Tingkat Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia	**77,5-79,45**	**96,78**	**82-83,95**	**95,24**	**86,5-88,45**	**96,77**	**91-92,95**	**98,01**	**Tercapai**
1 **Sastra – 1:** Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	**IKSS – 1:** Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	75	93,55	80	90,8	85	93,78	90	96,41	Tercapai
2 **Sastra – 2:** Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	**IKSS – 2:** Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	80-83,9%	100%	84-87,9%	99,68%	88-91,9%	99,75%	92-95,9%	99,61%	Tercapai
Tujuan – 2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	**Indikator Tujuan – 2:** Tingkat Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan	**80-83,9**	**100**	**84-87,9**	**99,56**	**88-91,9**	**99,72**	**92-95,9**	**99,25**	**Tercapai**
3 **Sastra – 3:** Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	**IKSS – 3:** Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85-87,9%	100%	88-90,9%	99,57%	91-93,9%	99,65	94-96,9%	99,54	Tercapai

Pada tingkat nasional, IPPD Kabupaten Bandung berada di bawah rata- rata nasional dengan selisih **11,84%** dari rata-rata nasional sebesar 96,41%. Data realisasi ini merupakan realisasi IPPN tahun 2023. Meskipun capaian kinerja Bapperida selalu

melebihi dari target yang ditetapkan yang menunjukan keberhasilan kinerja, namun hal ini tidak terlepas dari permasalahan dalam pencapaian kinerja tersebut. Secara garis besar kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Bapperida Kabupaten Bandung terbagi ke dalam urusan perencanaan serta riset dan inovasi. Salah satunya yaitu belum sinkron atau konsistennya antara program Perangkat Daerah yang direncanakan dan program yang dianggarkan tetap harus menjadi fokus capaian kinerja yangharus dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan dinamika pembangunan yang dihadapi saat ini dengan apa yang ingin dicapai di masa datang akan terus berubah.

3.1.2 Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Memperkuat Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan (Indikator : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah) Renstra 2025-2029

Pada Tahun 2025 merupakan tahun transisi antara dokumen renstra periode 2021-2026 dan 2025-2029. Dalam renstra periode tahun 2025-2029, Bapperida Kabupaten Bandung berada dalam misi ke-tiga yaitu Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel". Untuk dapat mewujudkan misi tersebut khususnya sasaran "Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel efektif dan efisien", maka harus ditunjang dengan tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Bandung yang dilengkapi dengan indikator yang mendukung dalam pencapaian tersebut. Berdasarkan integrasi penurunan visi dan misi Bupati Terpilih tersebut dirumuskan tujuan jangka menengah Bapperida Kabupaten Bandung yaitu "Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan" dengan indikator tujuannya yaitu "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)". Pada indikator tujuan yaitu "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)" dari target 79 poin terealisasi 81,50 poin sehingga capaian kinerja sebesar 103,16%. Untuk indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) pada dokumen Renstra 2025-2029 memiliki Definisi Operasional yang berbeda dengan IPPD pada IKU Dokumen Renstra 2021-2026. Definisi operasional tersebut mengacu pada **Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perhitungan IPPN dengan Definisi Operasional : (Komponen Sinergi) + (Komponen Kualitas Perencanaan) + (Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja).** Dengan capaian sebesar 103,16%, kinerja IPPD tahun 2025 dapat dikategorikan efektif dan melampaui ekspektasi perencanaan tahunan, sekaligus menunjukkan bahwa arah kebijakan dan strategi BAPPERIDA dalam penguatan tata kelola perencanaan telah memberikan hasil yang positif. Ke depan, capaian ini menjadi landasan penting untuk menjaga konsistensi

peningkatan kualitas perencanaan pembangunan agar tetap selaras dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029.

Indikator: Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Memperkuat Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IPPD Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Realisasi 2025	Selisih (Realisasi–Target)	Capaian (%)	Kategori Kinerja
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	79 Poin	81,50 Poin	+2,50 Poin	103,16%	Melampaui Target

Sumber : Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pada Tahun 2025 ditetapkan target IPPD sebesar **79 poin**. Adapun realisasi yang dicapai adalah sebesar **81,50 poin**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **103,16%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Tahun 2025 tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebagai baseline Renstra, yaitu sebesar **76,71 poin**, maka pada Tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar **4,79 poin**. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas perencanaan pembangunan daerah, terutama pada aspek sinergi perencanaan, peningkatan kualitas dokumen perencanaan, serta penguatan keterhubungan antara perencanaan pembangunan dan perencanaan kinerja sebagaimana komponen IPPD versi 2023 sesuai ketentuan Bappenas terintegrasi, dan berbasis kinerja.

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi IPPD

Uraian	Tahun 2024 (Baseline)	Tahun 2025 (Target)	Tahun 2025 (Realisasi)	Capaian 2025 (%)
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	76,71 poin	79,00 poin	81,50 poin	103,16%

Sumber : Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan menggambarkan penguatan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang semakin akuntabel, terintegrasi, dan berbasis kinerja.

Untuk dapat memprediksikan atau proyeksi capaian sampai tahun terakhir Renstra, maka capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2030 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Uraian	Baseline 2024	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
IPPD (Poin)	76,71 poin	81,50 poin	83,20 poin	85,70 poin	88,00 poin	91,00 poin	93,50 poin

Sumber : Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Adapun target IPPD dalam Renstra ditetapkan meningkat secara progresif hingga mencapai 91,00 poin pada Tahun 2029 dan 93,50 poin pada Tahun 2030. Dengan capaian sebesar 81,50 poin pada tahun pertama periode Renstra, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi berada pada jalur yang tepat (on track) dalam mendukung pencapaian target jangka menengah.

Secara komparatif, apabila dihitung terhadap target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 91,00 poin, maka capaian Tahun 2025 telah mencapai sekitar 89,56% dari target akhir periode. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu tahun pertama implementasi Renstra, BAPPERIDA telah mampu merealisasikan hampir sembilan puluh persen dari target akhir periode, sehingga memberikan ruang yang cukup untuk konsolidasi, penguatan kualitas, dan keberlanjutan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa strategi peningkatan kualitas perencanaan, penguatan integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja, serta penerapan pendekatan berbasis bukti (evidence-based planning) telah berjalan secara efektif. Namun demikian, untuk menjaga kesinambungan peningkatan menuju target 2029–2030, diperlukan konsistensi dalam peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penguatan sinergi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam proses perumusan kebijakan.

Indikator Tujuan BAPPERIDA Kabupaten Bandung yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) merupakan indikator yang pengukurannya mengacu pada ketentuan nasional, yakni Surat Edaran Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perhitungan IPPD. Dengan demikian, standar penilaian IPPD bersifat nasional dan menggunakan komponen yang sama untuk seluruh pemerintah daerah.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi IPPD Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Uraian	Nilai
Realisasi IPPD BAPPERIDA 2025	81,50 poin
Target Nasional Kategori “Baik”	≥ 80 poin
Target Nasional Kategori “Sangat Baik”	≥ 90 poin
Selisih terhadap Batas Minimal “Baik”	+1,50 poin
Selisih terhadap Batas “Sangat Baik”	-8,50 poin
Kategori Tahun 2025	**Baik**

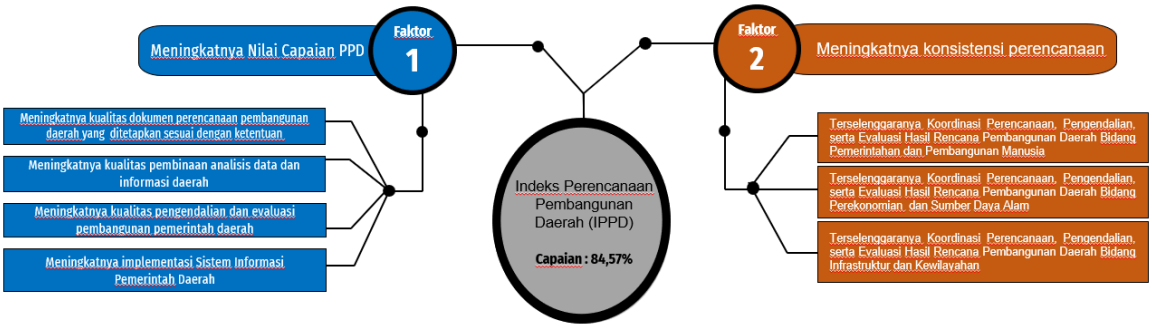
Sumber : Pengolahan data Bapperida Desember 2025

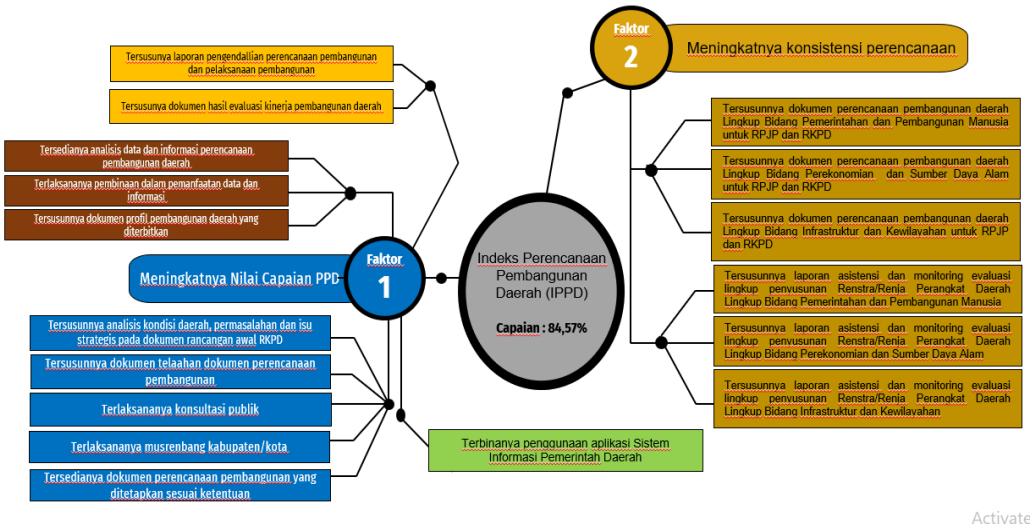
Secara komparatif terhadap standar nasional, realisasi IPPD Tahun 2025 menempatkan BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam kategori “Baik”, serta menunjukkan kinerja yang kompetitif secara nasional.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang peningkatan sebesar 8,50 poin untuk mencapai kategori “Sangat Baik” sebagaimana ditargetkan dalam Renstra. Dengan tren peningkatan yang progresif pada tahun pertama periode Renstra, peluang untuk mencapai standar nasional tertinggi pada akhir periode perencanaan dinilai realistis, sepanjang strategi peningkatan kualitas perencanaan dan integrasi kinerja dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan

Adapun faktor pendukung dan kendala atau permasalahan yang dihadapi pada saat pencapaian kinerja Bapperida khususnya pada capaian IPPD Tahun 2025 baik Renstra 2021-2026 dan 2025-2029, serta solusi yang diusahakan untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya yaitu:

Faktor keberhasilan **“Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah”** didukung dengan meningkatnya **Indeks Perencanaa Pembangunan Daerah (IPPD)** dengan realisasi IPPD Tahun 2025 sebesar **84,57%**. Adapun tercapainya IPPD Tahun 2025 ini didukung oleh beberapa faktor yang dapat dilihat pada infografis dibawah ini:





Gambar 3.4
Infografis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan IPPD (Sasaran Program-Sasaran Kegiatan-Subkegiatan)

Jika dilihat dari infografis diatas faktor yang mendukung keberhasilan capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai Capaian PPD dengan persentase nilai sebesar 101,81%. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan kinerja operasional yang mendukung hal tersebut yaitu:
   a. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dengan persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan dan tepat waktu serta berita acara yang disahkan sebesar 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja diantaranya:
      - Tersusunnya analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pada dokumen rancangan awal dokumen perencanaan pembangunan daerah sebanyak 2 dokumen (RKPD dan RPJPD);
      - Tersusunnya dokumen telaahan dokumen perencanaan pembangunan sebanyak 2 dokumen;
      - Terlaksananya konsultasi publik dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan hasil Berita Acara sebanyak 1 BA;
      - Terlaksananya musrenbang kabupaten dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan hasil Berita Acara sebanyak 1 BA;
      - Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan sesuai ketentuan sebanyak 2 dokumen.
   b. Meningkatnya kualitas pembinaan analisis data dan informasi daerah dengan persentase rekomendasi hasil analisis data yang dilaksanakan dalam dokumen perencanaan sebesar 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh

kinerja diantaranya:

- Tersedianya dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebanyak 1 dokumen;
- Terlaksananya pembinaan dalam pemanfaatan data dan informasi pada 68 orang aparatur;
- Tersusunnya dokumen profil pembangunan daerah yang diterbitkan sebanyak 3 buku.

c. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan pemerintah daerah dengan persentase perangkat daerah yang memiliki kinerja baik dan sangat baik sebesar 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja diantaranya:

- Tersusunya laporan pengendallian perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan sebanyak 1 laporan;
- Tersusunya dokumen hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah sebanyak 1 dokumen.

d. Meningkatnya implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan presentase ketersediaan dokumen SIPD sebesar 100%.

2. Meningkatnya konsistensi perencanaan dengan persentase rata-rata keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD, Renja dengan RKPD, dan RKA dengan RKPD sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan kinerja operasional yang mendukung hal tersebut yaitu:

a. Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, serta Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan persentase 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja diantaranya:

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebanyak 1 dokumen;
- Tersusunnya laporan asistensi dan monitoring evaluasi lingkup penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebanyak 2 dokumen.

b. Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, serta Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan persentase 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja diantaranya:

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebanyak 1 dokumen;
- Tersusunnya laporan asistensi dan monitoring evaluasi lingkup penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang

Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebanyak 2 dokumen.

c. Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, serta Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan persentase 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja diantaranya:
   - Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebanyak 1 dokumen;
   - Tersusunnya laporan asistensi dan monitoring evaluasi lingkup penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebanyak 2 dokumen.

Pada Tahun 2025 tidak mengakselerasi nilai IPPD Kabupaten Bandung dikarenakan pada Renja Perubahan 2025 mengakomodir indikator yang berbeda, sehingga tidak dilakukan penyesuaian target Tahun 2025.

Tabel 3.12
Analisis Faktor Penyebab Peningkatan Kinerja IPPD Tahun 2025
(Renstra 2025-2029)

No	Faktor Penyebab	Uraian Analitis	Dampak terhadap IPPD
1	Penguatan sinergi dokumen perencanaan	Peningkatan konsistensi antara RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja PD	Meningkatkan skor komponen sinergi perencanaan
2	Integrasi perencanaan dan kinerja	Penyelarasan indikator program/kegiatan dengan indikator kinerja utama (IKU)	Meningkatkan komponen keterhubungan perencanaan dan kinerja
3	Pendekatan evidence-based planning	Pemanfaatan data sektoral, hasil riset dan inovasi dalam penyusunan dokumen	Meningkatkan kualitas substansi perencanaan
4	Peningkatan kapasitas SDM perencana	Bimtek, asistensi, dan desk penyusunan dokumen perencanaan	Mengurangi inkonsistensi dan meningkatkan kualitas teknis dokumen
5	Monitoring dan evaluasi berkala	Pelaksanaan reviu dan pengendalian perencanaan secara periodik	Mempercepat koreksi terhadap deviasi perencanaan

Sumber : Bapperida Desember 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan IPPD Tahun 2025 lebih dominan dipengaruhi oleh faktor perbaikan tata kelola dan kualitas proses perencanaan.

Tabel 3.13
Alternatif Solusi dan Tindak Lanjut Perbaikan

No	Permasalahan	Alternatif Solusi	Status Pelaksanaan
1	Kesenjangan kualitas perencanaan antar PD	Peningkatan asistensi teknis dan klinik perencanaan	Berjalan
2	Integrasi perencanaan dan kinerja belum optimal	Penyempurnaan cascading kinerja dan penyelarasan indikator	Berjalan
3	Pemanfaatan riset belum maksimal	Penguatan kebijakan berbasis bukti melalui forum riset dan inovasi daerah	Berjalan
4	Pengendalian belum seragam	Optimalisasi monitoring dan evaluasi berbasis aplikasi	Dalam penguatan

Sumber : Bapperida Desember 2025

Peningkatan IPPD Tahun 2025 merupakan hasil dari penguatan tata kelola perencanaan, peningkatan kualitas substansi dokumen, serta integrasi yang lebih baik antara perencanaan pembangunan dan perencanaan kinerja. Secara struktural, peningkatan sebesar 4,79 poin dalam satu tahun menunjukkan laju perbaikan yang akseleratif dan berada di atas kebutuhan rata-rata peningkatan tahunan untuk mencapai target akhir Renstra. Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan tren positif dan mencapai kategori “Sangat Baik” pada akhir periode Renstra, diperlukan konsistensi dalam : Penguatan kapasitas SDM perencana, Integrasi sistem informasi perencanaan dan kinerja, Optimalisasi pemanfaatan data dan hasil riset dalam perumusan kebijakan, serta Monitoring dan evaluasi yang adaptif terhadap dinamika regulasi nasional.



Gambar 3.5
Infografis Upaya Perbaikan Nilai IPPD

Upaya perbaikan yang dilakukan unutk dapat mengakselerasi kinerja nilai IPPD Tahun 2025 (Renstra 2021-2025) meliputi:

Adapun rincian dari upaya perbaikan nilai IPPD Kabupaten Bandung diantaranya yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi
   a. Data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah akurat, lengkap, dan *up to date*;
   b. Kualitas statistik yang digunakan dalam merumuskan indikator pembangunan
2. Peningkatan Efektivitas Penganggaran
   a. Mengoptimalkan alokasi anggaran merujuk pada skal prioritas pembangunan yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan yang transparan dan berbasis kebutuhan;
   b. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan anggaran.
3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya manusia (SDM)
   a. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur dalam merancanag, menyusun, dan mengelola perencanaan pembangunan;
   b. Memberikan pelatihan terkait penggunaan teknologi untuk mendukung perencanaan berbasis analisis data;
4. Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan;
   Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian pembangunan guna menganalisis faktor penghambat dan pendorong dalam implementasi perencanaan.
5. Partisipasi Masyarakat yang lebih aktif;
   Melaksanakan musrenbang dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan yang relevan.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
   a. Menggunakan sistem manajemen berbasis teknologi untuk memantau, mengelola, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
   b. Memanfaatkan aplikasi untuk mempermudah analisis data perencanaan yang lebih akurat.
7. Perencanaan yang Terintegrasi;
   Menyusun perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan memperhatikan berbagai macam sektor;
8. Pendekatan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan
   Menyusun perencanaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan, untuk menghindari dampak negatif jangka panjang terhadap sumber daya alam dan kehidupan masyarakat.

   Efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis melalui perbandingan antara

capaian kinerja (output/outcome) dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun dukungan sistem, yang terdiri dari :

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia

   Peningkatan kualitas perencanaan lebih banyak dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas dan koordinasi SDM perencana dibandingkan dengan penambahan jumlah personel. Artinya, efisiensi dicapai melalui peningkatan kompetensi, bukan ekspansi struktur.

2. Efisiensi Proses melalui Integrasi Sistem

   Penguatan integrasi perencanaan dan kinerja serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan berkontribusi pada pengurangan duplikasi pekerjaan dan percepatan konsolidasi dokumen, sehingga meningkatkan produktivitas organisasi

3. Efektivitas dan Efisiensi dalam Penggunaan Biaya (*Cost-Effectiveness*)

3.1.3 Sasaran 1: Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah (Indikator : Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja)

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja

Realisasi Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2025			
No.	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1.	24,50	24,48	99,92 %

Sumber : Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Untuk mewujudkan sasaran strategis *"Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah",* indikator sasaran yang ditetapkan adalah Indeks SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja. Pada indeks sakip komponen perencanaan kinerja menunjukkan bahwa proses perencanaan kinerja telah dilaksanakan secara optimal dan konsisten sesuai dengan standar dan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun capaian indeks indeks sakip komponen perencanaan kinerja Kabupaten Bandung pada Tahun 2025 baik dengan capaian 99,92%, dari target sebesar 24,50 poin dan terealisasi sebesar 24,48 poin. Realisasi kinerja menunjukkan capaian yang sangat mendekati target yang telah ditetapkan, dengan selisih sebesar 0,02 poin.

Tabel 3.15
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2023-2025

Perbandingan Realisasi serta capaian kinerja Tahun 2023-2025				
NO	TAHUN 2025		REALISASI 2024	REALISASI 2023
	REALISASI	CAPAIAN		
1	24,48	99,92 %	24,41	23,97

Sumber: Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Indeks SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja merupakan indikator baru yang ada pada dokumen renstra periode 2025-2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu. Namun jika dibandingkan dengan data realisasi Tahun 2024 **meningkat 0,07 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 24,41 poin dan tahun 2023 sebesar 23,97.**

Tabel 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

No.	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
1.	24,50	24,48	24,86	98,47%

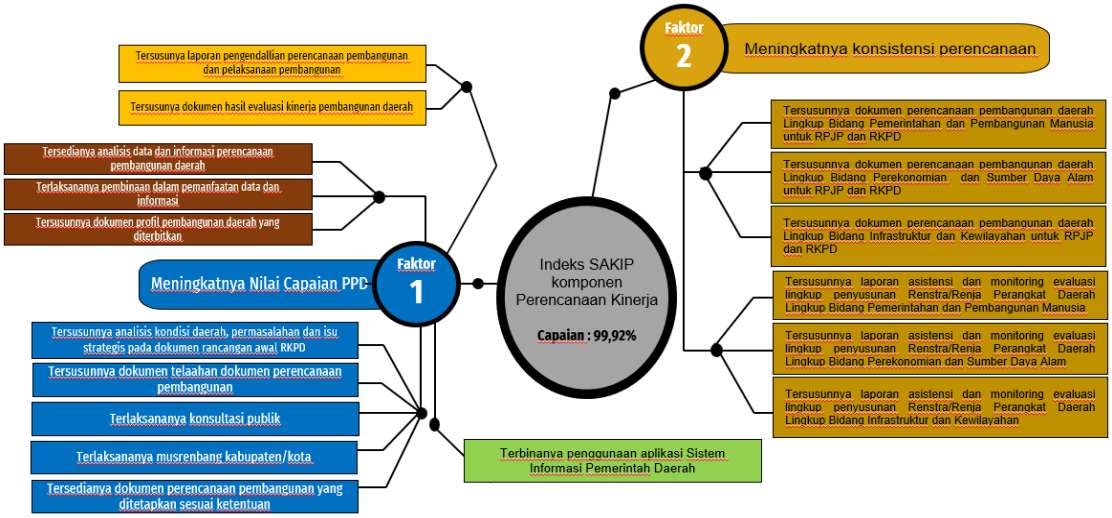
Sumber: Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Dilihat dari persfektif perencanaan Jangka menengah, capaian Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja Kabupaten Bandung tahun 2025 belum mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 98,47% dari target akhir RENSTRA sebesar 24,86 poin dan terealisasi 24,48 poin pada tahun 2025**.**

Pada tingkat nasional, untuk SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Kabupaten Bandung tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan nilai rata rata nasional, dikarenakan data tersebut belum dapat diakses secara publik.

Meskipun capaian kinerja Bapperida belum melebihi dari target yang ditetapkan, namun setiap tahunnya realisasi SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Kabupaten Bandung selalu **meningkat**, yang menunjukan keberhasilan kinerja. Namun hal ini tidak terlepas dari permasalahan dalam pencapaian kinerja tersebut. Secara garis besar kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Bapperida Kabupaten Bandung terbagi ke dalam urusan perencanaan serta riset dan inovasi. Salah satunya yaitu belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan dinamika pembangunan yang dihadapi saat ini dengan apa yang ingin dicapai di masa datang akan terus berubah.

Faktor keberhasilan “Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah” didukung dengan meningkatnya “Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Kabupaten Bandung” dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 24,41 Poin. Adapun tercapainya nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Kabupaten Bandung didukung oleh beberapa faktor yang dapat dilihat pada infografis dibawah ini:



Gambar 3.6
Infografis Faktor-Faktor Keberhasilan Capaian Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Jika dilihat dari infografis diatas faktor yang mendukung keberhasilan capaian Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai Capaian PPD dengan persentase nilai sebesar 101,81%. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan kinerja operasional yang mendukung hal tersebut yaitu:
   a. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dengan persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan dan tepat waktu serta berita acara yang disahkan sebesar 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja diantaranya:
      - Tersusunnya analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pada dokumen rancangan awal dokumen perencanaan pembangunan daerah sebanyak 2 dokumen (RKPD dan RPJPD);
      - Tersusunnya dokumen telaahan dokumen perencanaan pembangunan sebanyak 2 dokumen;
      - Terlaksananya konsultasi publik dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan hasil Berita Acara sebanyak 1 BA;

- Terlaksananya musrenbang kabupaten dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan hasil Berita Acara sebanyak 1 BA;
- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan sesuai ketentuan sebanyak 2 dokumen.

b. Meningkatnya kualitas pembinaan analisis data dan informasi daerah dengan persentase rekomendasi hasil analisis data yang dilaksanakan dalam dokumen perencanaan sebesar 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja diantaranya:
   - Tersedianya dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebanyak 1 dokumen;
   - Terlaksananya pembinaan dalam pemanfaatan data dan informasi pada 68 orang aparatur;
   - Tersusunnya dokumen profil pembangunan daerah yang diterbitkan sebanyak 3 buku.

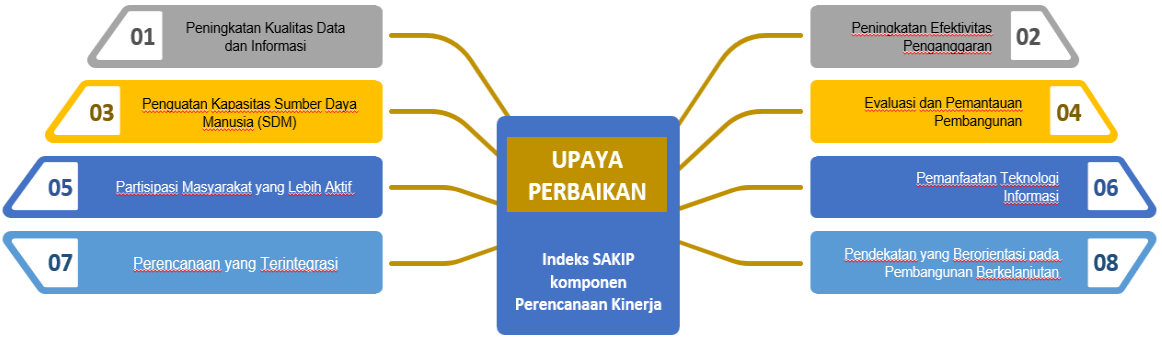
c. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan pemerintah daerah dengan persentase perangkat daerah yang memiliki kinerja baik dan sangat baik sebesar 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja diantaranya:
   - Tersusunya laporan pengendallian perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan sebanyak 1 laporan;
   - Tersusunya dokumen hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah sebanyak 1 dokumen.

d. Meningkatnya implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan presentase ketersediaan dokumen SIPD sebesar 100%.

2. Meningkatnya konsistensi perencanaan dengan persentase rata-rata keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD, Renja dengan RKPD, dan RKA dengan RKPD sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan kinerja operasional yang mendukung hal tersebut yaitu:
   a. Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, serta Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan persentase 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja diantaranya:
      - Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebanyak 1 dokumen;
      - Tersusunnya laporan asistensi dan monitoring evaluasi lingkup penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebanyak 2 dokumen.

b. Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, serta Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan persentase 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja diantaranya :
   - Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebanyak 1 dokumen;
   - Tersusunnya laporan asistensi dan monitoring evaluasi lingkup penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebanyak 2 dokumen.

c. Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, serta Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan persentase 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja diantaranya:
   - Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebanyak 1 dokumen;
   - Tersusunnya laporan asistensi dan monitoring evaluasi lingkup penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebanyak 2 dokumen.



Gambar 3.7
Infografis Upaya Perbaikan Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk dapat mengakselerasi kinerja nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi
   a. Data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah akurat, lengkap, dan *up to date*;
   b. Kualitas statistik yang digunakan dalam merumuskan indikator pembangunan

2. Peningkatan Efektivitas Penganggaran

a. Mengoptimalkan alokasi anggaran merujuk pada skal prioritas pembangunan yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan yang transparan dan berbasis kebutuhan;

b. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan anggaran.

3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya manusia (SDM)
   a. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur dalam merancanag, menyusun, dan mengelola perencanaan pembangunan;
   b. Memberikan pelatihan terkait penggunaan teknologi untuk mendukung perencanaan berbasis analisis data;
4. Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan;
   a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian pembangunan guna menganalisis faktor penghambat dan pendorong dalam implementasi perencanaan.
5. Partisipasi Masyarakat yang lebih aktif;
   a. Melaksanakan musrenbang dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan yang relevan.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
   a. Menggunakan sistem manajemen berbasis teknologi untuk memantau, mengelola, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
   b. Memanfaatkan aplikasi untuk mempermudah analisis data perencanaan yang lebih akurat.
7. Perencanaan yang Terintegrasi;
   a. Menyusun perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan memperhatikan berbagai macam sektor;
8. Pendekatan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan
   a. Menyusun perencanaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan, untuk menghindari dampak negatif jangka panjang terhadap sumber daya alam dan kehidupan masyarakat.

Efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis melalui perbandingan antara capaian kinerja (output/outcome) dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun dukungan sistem, yang terdiri dari :

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia

   Peningkatan kualitas perencanaan lebih banyak dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas dan koordinasi SDM perencana dibandingkan dengan penambahan jumlah personel. Artinya, efisiensi dicapai melalui peningkatan kompetensi, bukan ekspansi struktur.

2. Efisiensi Proses melalui Integrasi Sistem

   Penguatan integrasi perencanaan dan kinerja serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan berkontribusi pada pengurangan duplikasi pekerjaan dan percepatan konsolidasi dokumen, sehingga meningkatkan produktivitas organisasi

3. Efektivitas dan Efisiensi dalam Penggunaan Biaya (*Cost-Effectiveness*)

Meningkatnya nilai IPPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 baik Renstra 2021-2026 dan 2025-2029, dan juga Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 didukung oleh dua program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis nilai IPPD adalah sebesar **13,72%** atau setara Rp **844.909.834,-.** Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar **Rp. 6.155.993.300,** dan terealisasi sebesar **Rp. 5.311.083.466,-.**

Capaian kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan penunjang keberhasilan capaian IPPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 telah melebihi dari target yang ditetapkan . Adanya subkegiatan koordinasi, asistensi dan monitoring serta evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat berperan penting dalam penilaian IPPD khususnya dalam aspek kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan.

Berikut ini merupakan intergrasi sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan dan subkegiatan Bapperida Tahun 2025 yang mendukung pada capaian kinerja IPPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 :

Tabel 3.17
Matriks Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Bapperida Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Memperkuat Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian nilai PPD	90,9	%	90.26	%
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	- Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	100	%	100	%
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanaan di perencanaan pembangunan - Daerah	100	%	100	%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik	96,3	%	100	%
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen SIPD	100	%	100	%
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Presentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	100	%	100	%
				- Presentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD	100	%	100	%
				- Presentase muatan RKA dengan RKPD	100	%	100	%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	%	100	%
				2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	%	100	%
				3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	%	100	%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA	100	%	100	%
				2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA	100	%	100	%
				3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA	100	%	100	%
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	%	100	%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	%	100	%
				3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	%	100	%

Sumber: Pengolahan data Bapperida Desember 2025

3.1.4 Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Memperkuat Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan (Indikator ke 2 : Persentase Kebijakan Berbasis Bukti)

Pada Tahun 2025 merupakan tahun transisi antara dokumen renstra periode 2021-2026 dan 2025-2029. Dalam renstra periode tahun 2025-2029, Bapperida Kabupaten Bandung berada dalam misi ke-tiga yaitu Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel". Untuk dapat mewujudkan misi tersebut khususnya sasaran "Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel efektif dan efisien", maka harus ditunjang dengan tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Bandung yang dilengkapi dengan indikator yang mendukung dalam pencapaian tersebut. Berdasarkan integrasi penurunan visi dan misi Bupati Terpilih tersebut dirumuskan tujuan jangka menengah Bapperida Kabupaten Bandung yaitu "Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan" dengan indikator tujuannya yang ke 2 yaitu "Persentase Kebijakan Berbasis Bukti". Untuk indikator tujuan yaitu Persentase Kebijakan Berbasis Bukti memiliki Definisi Operasional: Jumlah Rencana Aksi Bupati yang didukung oleh Hasil Riset dan Inovasi (Naskah Kebijakan dan lain lain) / Jumlah Rencana Aksi Bupati x 100% dengan target 20% terealisasi 22,81% sehingga capaian kinerja sebesar 114,05%.

Berdasarkan data Tahun 2025, capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Realisasi 2025	Selisih	Capaian (%)
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	20%	22,81%	+2,81%	114,05%

Sumber: Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Realisasi Tahun 2025 sebesar **22,81%** melampaui target yang ditetapkan sebesar 20%, dengan tingkat capaian **114,05%**. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kebijakan yang telah didukung oleh hasil riset dan inovasi melebihi perencanaan awal.

Indikator **Persentase Kebijakan Berbasis Bukti** merupakan ukuran tingkat pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Indikator ini menjadi representasi konkret dari penerapan *evidence-based policy* dalam sistem perencanaan pembangunan.

Berdasarkan data Renstra dan capaian Tahun 2025, perkembangan indikator ini menunjukkan tren peningkatan sebagai berikut :

Tabel 3.19
Perkembangan Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024 (Baseline)	10%	10%*	100%*
2025	20%	22,81%	114,05%

Sumber: Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Realisasi Tahun 2025 sebesar **22,81%** meningkat signifikan dibandingkan baseline Tahun 2024 sebesar 10%. Terjadi kenaikan sebesar **12,81 persentase**, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya akselerasi dalam penerapan kebijakan berbasis bukti pada tahun pertama periode Renstra. Secara keseluruhan, perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Untuk dapat memprediksikan atau proyeksi capaian sampai tahun terakhir Renstra, maka capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2030 sebagai berikut :

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tahun	Target Renstra (%)	Realisasi (%)	Deviasi terhadap Target Tahunan	Posisi terhadap Target 2029
2024 (Baseline)	10%	10%	-	-
2025	20%	22,81%	+2,81%	25,34% dari target 2029
2026	40%	-	-	-
2027	60%	-	-	-
2028	80%	-	-	-
2029	90%	-	-	-
2030	100%	-	-	-

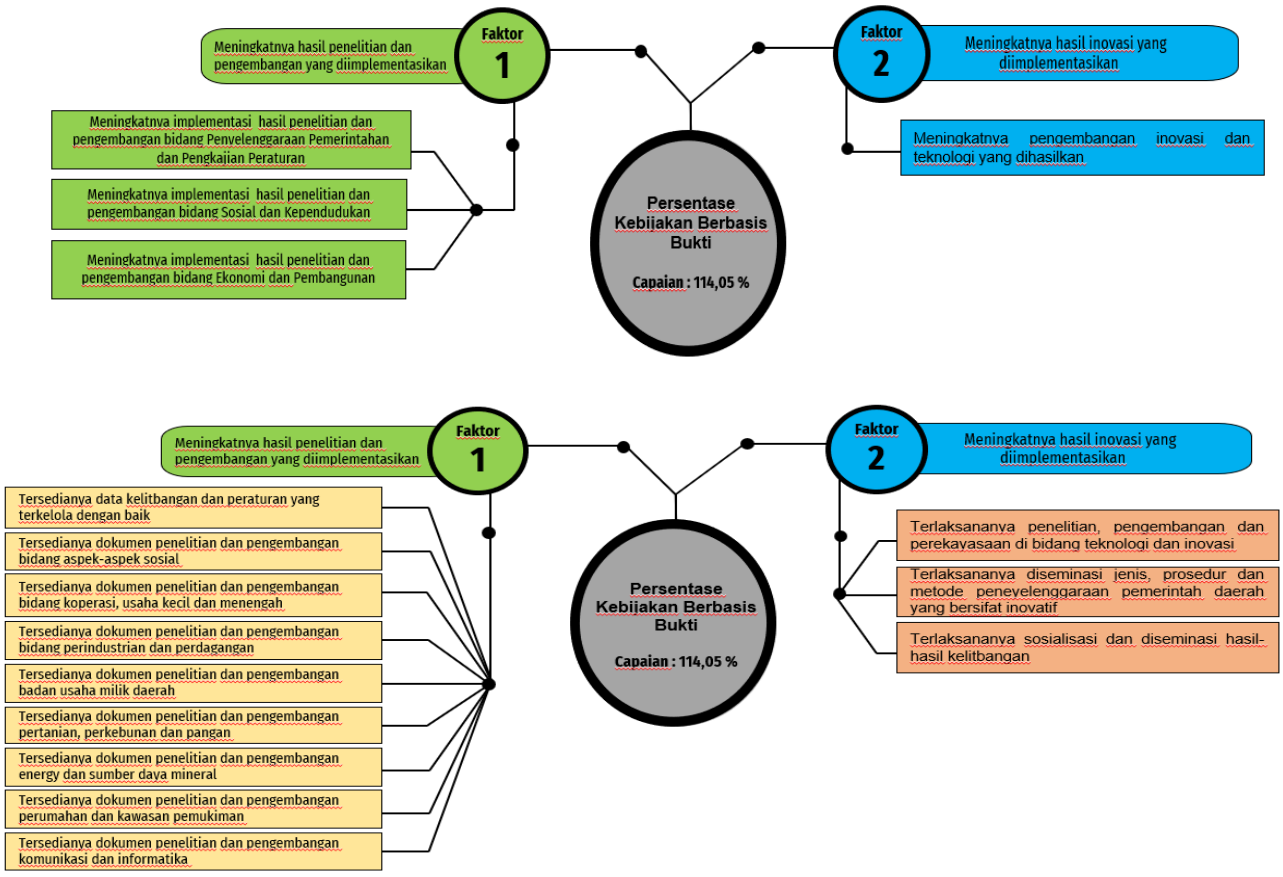
Sumber: Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Dengan realisasi 22,81%, capaian Tahun 2025 baru mencapai sekitar **25,34% dari target akhir 90% pada Tahun 2029**. Artinya, masih terdapat gap sebesar **67,19 poin** untuk mencapai target akhir periode. Capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa indikator berada pada jalur yang baik (on track) untuk fase awal Renstra.

Indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti pada dasarnya merupakan indikator internal strategis BAPPERIDA yang selaras dengan arah kebijakan nasional mengenai penguatan *evidence-based policy*. Namun demikian, secara regulatif tidak terdapat angka baku nasional yang menetapkan batas minimal persentase tertentu sebagai standar kuantitatif nasional (misalnya 50% atau 80%). Yang ada adalah standar normatif bahwa kebijakan publik harus didukung oleh data, hasil kajian, dan analisis yang memadai. **Kesesuaian dengan Prinsip Nasional**, Realisasi 22,81% menunjukkan bahwa BAPPERIDA telah mengimplementasikan pendekatan kebijakan berbasis bukti secara nyata. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam

reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola perencanaan.

Meskipun capaian kinerja Bapperida selalu melebihi dari target yang ditetapkan yang menunjukan keberhasilan kinerja, namun hal ini tidak terlepas dari permasalahan dalam pencapaian kinerja tersebut. Secara garis besar kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Bapperida Kabupaten Bandung terbagi ke dalam urusan perencanaan serta riset dan inovasi baik Renstra 2021-2025 maupun 2025-2029. Faktor keberhasilan **"Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Memperkuat Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan"** didukung dengan meningkatnya **Persentase Kebijakan Berbasis Bukti** dengan realisasi Tahun 2025 sebesar **22,81%**. Adapun tercapainya Persentase Kebijakan Berbasis Bukti Tahun 2025 ini didukung oleh beberapa faktor yang dapat dilihat pada infografis dibawah ini:



Gambar 3.8
Infografis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Sasaran Program- Kegiatan-SubKegiatan)

Jika dilihat dari infografis diatas faktor yang mendukung keberhasilan capaian Persentase Kebijakan Berbasis Bukti diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatnya Capaian Persentase Kebijakan Berbasis Bukti sebesar **114,05%**. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan kinerja operasional yang mendukung hal tersebut yaitu:
   a. Meningkatnya implementasi hasil penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan sebesar 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja tersedianya data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik sebanyak 1 dokumen.
   b. Meningkatnya implementasi hasil penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan dengan persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan sebesar 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja tersedianya dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial sebanyak 1 dokumen;
   c. Meningkatnya implementasi hasil penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan sebesar 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja diantaranya:
      - Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebanyak 1 dokumen;
      - Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang perindustrian dan perdagangan sebanyak 1 dokumen;
      - Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan sebanyak 1 dokumen;
      - Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan energy dan sumber daya mineral sebanyak 1 dokumen;
      - Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup sebanyak 1 dokumen;
   d. Meningkatnya pengembangan inovasi dan teknologi yang dihasilkan dengan persentase hasil inovasi yang telah dilegalformalkan dan menjadi lampiran dalam Surat Keputusan Bupati Bandung. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja diantaranya:
      - Terlaksananya penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi dengan ketersediaan dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang inovasi sebanyak 1 dokumen dan pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah (IID);

- Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan dengan capaian jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan sebanyak 1 laporan.

Secara analitis, peningkatan kinerja pada Indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Penguatan Peran Kelitbangan dalam Perencanaan
   Integrasi fungsi riset dan inovasi dengan fungsi perencanaan mendorong meningkatnya jumlah kebijakan yang didukung naskah kajian.
2. Penerapan Pendekatan Data-Driven Decision Making
   Peningkatan pemanfaatan data sektoral dan hasil evaluasi program dalam penyusunan dokumen perencanaan mendorong kebijakan lebih berbasis bukti.
3. Peningkatan Kapasitas SDM Perencana
   Bimbingan teknis, asistensi penyusunan naskah kebijakan, dan penguatan analisis kebijakan meningkatkan kualitas dokumen yang dihasilkan.
4. Komitmen Pimpinan terhadap Evidence-Based Policy
   Dukungan kebijakan internal yang mendorong setiap rencana aksi disertai dasar analitis atau kajian pendukung.

Adapun upaya perbaikan yang dilakukan untuk dapat mengakselerasi kinerja berikutnya meliputi :



Gambar 3.9
Infografis Upaya Perbaikan Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Adapun rincian dari upaya perbaikan capaian persentase Persentase Kebijakan Berbasis Bukti diantaranya yaitu:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan cara pengadaan atau penambahan personel pegawai dengan jabatan fungsional peneliti dan analis kebijakan;
2. Dukungan anggaran yang memadai untuk dapat menghasilkan riset dan inovasi yang optimal dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi dengan semua perangkat daerah dan instansi vertikal dalam rangka pembinaan riset inovasi daerah;

4. Riset dan inovasi yang dilakukan harus berfokus pada isu strategis pembangunan sehingga dapat menyelasaikan isu-isu strategis pembangunan yang ada dan menjadi bahan pengambilan kebijakan oleh bidang perencana ataupun Perangkat Daerah lain;
5. Penguatan budaya riset dengan cara membangun kultur yang mendukung kreativitas dan inovasi di kalangan masyarakat luas, termasuk di kalangan pelajar dan profesional dalam hal ini melalui sebuah wadah Kompetisi Inovasi Bandung Bedas (KIBB);
6. Penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah dengan melibatkan bidang rida dalam perencanaan penganggaran (Anggota TAPD) agar dapat menyesuaikan porsi kegiatan sesuai dengan science based policy;
7. Dibuat SOP atau surat edaran perihal batasan/kriteria topik mengenai kajian yang bisa dilakukan oleh BAPPERIDA sebagai leading sector penelitian dan PD terkait.

Selain itu upaya perbaikan yang dilakukan untuk dapat mengakselerasi kinerja pada indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti meliputi :

1. Pelaksanaan bimtek dan klinik penyusunan naskah kebijakan berbasis riset
2. Penguatan mekanisme review kebijakan oleh tim kelitbangan
3. Pengembangan sistem pendokumentasian kajian dan naskah kebijakan
4. Sosialisasi dan internalisasi kebijakan berbasis bukti di seluruh perangkat daerah

Efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis melalui perbandingan antara capaian kinerja (output/outcome) dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun dukungan sistem, yang terdiri dari :

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia
   Peningkatan kebijakan berbasis bukti lebih banyak dihasilkan dari peningkatan kompetensi dan koordinasi SDM yang ada, bukan dari penambahan personel baru
2. Integrasi Fungsi Perencanaan dan Kelitbangan
   Sinergi antara fungsi riset dan perencanaan mengurangi duplikasi kegiatan serta mempercepat proses penyusunan kebijakan berbasis kajian
3. Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi
   Penggunaan data sektoral dan hasil evaluasi program yang telah tersedia mengurangi kebutuhan pengumpulan data ulang, sehingga menghemat waktu dan biaya.
4. Efektivitas dan Efisiensi dalam Penggunaan Biaya (*Cost-Effectiveness*)

3.1.5 Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi yang Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Indikator : Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi)

Tabel 3.21
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi

Realisasi Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi Tahun 2025			
No.	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1.	4,00	4,55	113,75 %

Sumber: Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Untuk mewujudkan sasaran strategis *"Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi yang Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah",* indikator sasaran pertama yang ditetapkan adalah Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi. Adapun capaian Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi pada Tahun 2025 sangat baik dengan capaian 113,75%, dari target sebesar 4,00 poin dan terealisasi sebesar 4,55 poin. Realisasi kinerja menunjukkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan, dengan selisih sebesar 0,55 poin

Tabel 3.22
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi Tahun 2023-2025

Perbandingan Realisasi serta capaian kinerja Tahun 2023-2025				
No	**Tahun 2025**		**Capaian 2024**	**Capaian 2023**
	Realisasi	**Capaian**		
1	4,55	113,75 %	N/A	N/A

Sumber: Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi merupakan indikator baru yang ada pada dokumen renstra periode 2025-2029. Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi mencapai 4,55%, **melebihi** target yang telah ditetapkan, namun belum dapat dibandingkan dengan tahun 2024, karena pada tahun 2024 Indikator belum ditetapkan sebagai target kinerja.

Tabel 3.23
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi dengan Target Jangka Menengah Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

No.	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
1.	4,00	4,55	24,00	18,96%

Sumber: Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah hingga tahun 2030 sebesar 24%, maka capaian tahun 2025 telah memenuhi tahapan awal (milestone),

Capaian Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi menunjukkan bahwa BAPPERIDA telah berada pada jalur yang sesuai *(on track)* dalam meningkatkan kualitas hasil riset yang terpublikasi pada jurnal terakreditasi. Secara progres kumulatif terhadap target akhir tahun 2030, realisasi tahun 2025 sebesar **4%** setara dengan **18,96%** dari target akhir periode Renstra. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan kinerja dirancang secara bertahap dan progresif setiap tahun, sehingga konsistensi dalam peningkatan kualitas riset dan publikasi ilmiah perlu terus dijaga agar target tahun-tahun berikutnya dapat tercapai**.**

Apabila dibandingkan dengan standar nasional, hingga saat ini tidak terdapat ketentuan baku secara nasional yang menetapkan persentase minimal hasil riset pemerintah daerah yang harus dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi. Namun demikian, secara nasional telah ditetapkan sistem akreditasi jurnal ilmiah melalui Sistem Akreditasi Jurnal Nasional (SINTA) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Standar nasional yang berlaku menekankan pada : 1. Publikasi pada jurnal terakreditasi (SINTA 1–6); 2. Pemenuhan kaidah ilmiah dan etika publikasi; 3. Proses review (peer review) yang terstandar; 4. Peningkatan kualitas dan sitasi karya ilmiah. Dengan demikian, meskipun tidak terdapat standar nasional dalam bentuk angka persentase tertentu, indikator yang digunakan oleh BAPPERIDA telah selaras dengan sistem dan standar mutu nasional publikasi ilmiah, karena mengacu pada jurnal terakreditasi secara nasional.

3.1.6 Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi yang Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Indikator : Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan)

Tabel 3.24
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan

Realisasi Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Tahun 2025			
No.	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1.	28,57	35,22	123,28 %

Sumber: Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Untuk mewujudkan sasaran strategis *"Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi yang Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah",* indikator sasaran kedua yang ditetapkan adalah Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan. Adapun capaian Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan pada Tahun 2025 **sangat baik** dengan capaian **123,28%,** dari target sebesar **28,57** dan terealisasi sebesar **35,22** poin. Realisasi kinerja menunjukkan capaian yang **melebihi target** yang telah ditetapkan, dengan selisih sebesar **6,65** poin. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan produk inovasi daerah berada pada **kategori sangat baik**, karena tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui target kinerja tahunan.

Tabel 3.25
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Tahun 2023-2025

Perbandingan Realisasi serta capaian kinerja Tahun 2023-2025				
No	Tahun 2025		Capaian 2024	Capaian 2023
	Realisasi	Capaian		
1	35,22	123,28 %	N/A	N/A

Sumber: Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan merupakan indikator baru yang ada pada dokumen renstra periode 2025-2029. Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan mencapai 35,22%, **melebihi** target yang telah ditetapkan, namun belum dapat dibandingkan dengan tahun 2024, karena pada tahun 2024 Indikator belum ditetapkan sebagai target kinerja.

Tabel 3.26
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan dengan Target Jangka Menengah Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

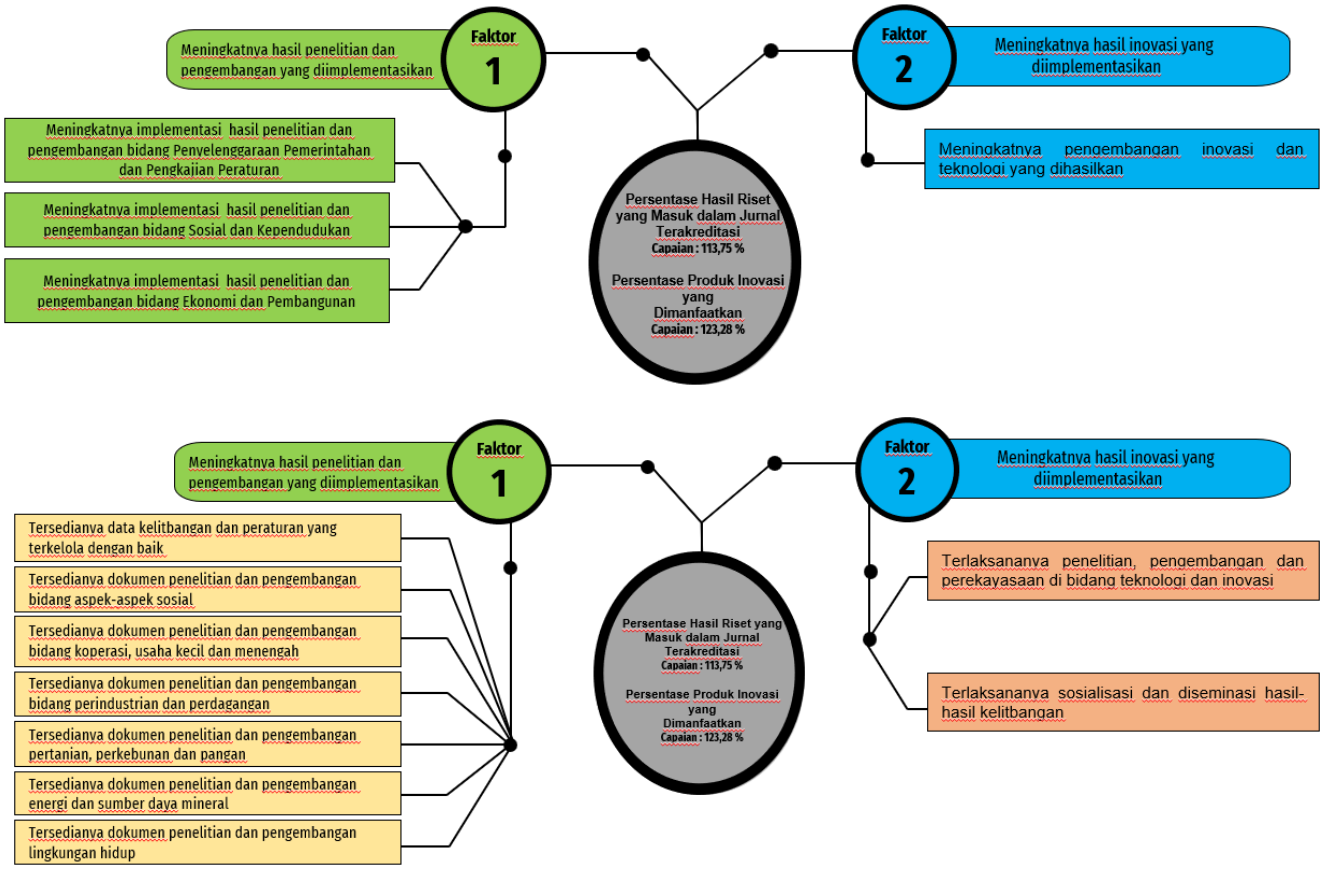
No.	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
1.	28,57	35,22	29,69	118,63%

Sumber: Pengolahan data Bapperida Desember 2025

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah hingga tahun 2030 sebesar 29,69%, capaian Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan tahun 2025 :sudah **melebihi** target akhir RPJMD yaitu sebesar **118,63%** dari target akhir Renstra sebesar **29,69% dan** terealisasi **35,22%** pada tahun 2025 **.**

Jika dibandingkan dengan standar nasional, indikator ini secara substansi selaras dengan pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam pengukuran IID, salah satu aspek penting yang dinilai adalah keberlanjutan dan pemanfaatan inovasi daerah yang terverifikasi dalam sistem nasional. Meskipun tidak terdapat angka baku nasional yang secara spesifik menetapkan batas minimal persentase pemanfaatan inovasi, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan jumlah inovasi yang aktif, terdokumentasi, dan berdampak nyata terhadap pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan. Secara keseluruhan, realisasi indikator Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dan sejalan dengan arah kebijakan nasional, serta menjadi fondasi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah dan hasil riset inovasi.

Adapun tercapainya target Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi dan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan didukung oleh beberapa faktor yang dapat dilihat pada infografis dibawah ini:



Gambar 3.10
Infografis Faktor-Faktor Keberhasilan Capaian Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi dan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Tahun 2025

Jika dilihat dari infografis diatas faktor yang mendukung keberhasilan capaian Persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang dimplementasikan diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatnya capaian Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi sebesar **113,75%**. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan kinerja operasional yang mendukung hal tersebut yaitu:
   a. Meningkatnya implementasi hasil penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan sebesar 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja tersedianya data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik sebanyak 1 laporan.
   b. Meningkatnya implementasi hasil penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan dengan persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan sebesar 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja tersedianya dokumen hasil

penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial sebanyak 1 dokumen;

c. Meningkatnya implementasi hasil penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan sebesar 100%. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja diantaranya:
   - Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebanyak 1 dokumen;
   - Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang perindustrian dan perdagangan sebanyak 1 dokumen;
   - Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan sebanyak 1 dokumen;
   - Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral sebanyak 1 dokumen;
   - Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup sebanyak 1 dokumen.

2. Meningkatnya capaian hasil inovasi yang dimanfaatkan sebesar **123,28%**. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan kinerja operasional yang mendukung hal tersebut yaitu:
   a. Meningkatnya pengembangan inovasi dan teknologi yang dihasilkan dengan persentase hasil inovasi yang telah dilegalformalkan dan menjadi lampiran dalam Surat Keputusan Bupati Bandung. Capaian ini juga dipengaruhi oleh kinerja diantaranya:
      - Terlaksananya penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi dengan ketersediaan dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang inovasi sebanyak 1 dokumen dan pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah (IID);
      - Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan dengan capaian jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan sebanyak 1 laporan.

Selain itu faktor lainnya seperti :

1. Komitmen Pimpinan dan Penguatan Kebijakan Internal
   Adanya komitmen pimpinan dalam mendorong penguatan peran riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dorongan untuk menghasilkan output riset yang memenuhi standar publikasi ilmiah nasional.
2. Peningkatan Kolaborasi dengan Akademisi dan Mitra Riset
   Terjalinnya kerja sama dengan perguruan tinggi dan tenaga ahli dalam pelaksanaan riset, sehingga kualitas metodologi dan substansi penelitian lebih memenuhi kriteria jurnal terakreditasi.

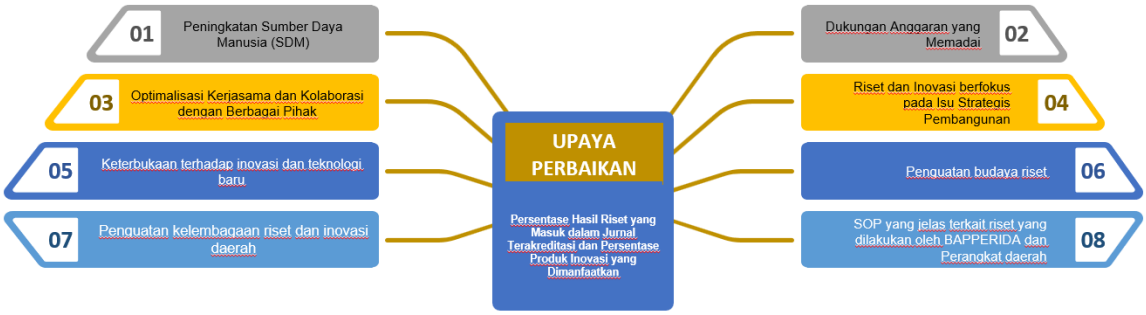
3. Perbaikan Tata Kelola Riset

   Mulai diterapkannya mekanisme seleksi, pendampingan, dan review internal terhadap hasil riset sebelum diajukan ke jurnal terakreditasi.

4. Sinkronisasi Riset dengan Kebutuhan Kebijakan

   Tema riset telah diarahkan pada isu-isu strategis daerah sehingga memiliki relevansi tinggi dan nilai kebaruan yang lebih kuat untuk dipublikasikan.

Adapun upaya perbaikan yang dilakukan untuk dapat mengakselerasi Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi dan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan :



Gambar 3.11
Infografis Upaya Perbaikan Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi dan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan

Adapun rincian dari upaya perbaikan persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang dimplementasikan diantaranya yaitu:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan cara pengadaan atau penambahan personel pegawai dengan jabatan fungsional peneliti dan analis kebijakan;
2. Dukungan anggaran yang memadai untuk dapat menghasilkan riset dan inovasi yang optimal dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi dengan semua perangkat daerah dan instansi vertikal dalam rangka pembinaan riset inovasi daerah;
4. Riset dan inovasi yang dilakukan harus berfokus pada isu strategis pembangunan sehingga dapat menyelasaikan isu-isu strategis pembangunan yang ada dan menjadi bahan pengambilan kebijakan oleh bidang perencana ataupun Perangkat Daerah lain;
5. Penguatan budaya riset dengan cara membangun kultur yang mendukung kreativitas dan inovasi di kalangan masyarakat luas, termasuk di kalangan pelajar dan profesional dalam hal ini melalui sebuah wadah Kompetisi Inovasi Bandung Bedas (KIBB);
6. Penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah dengan melibatkan bidang rida dalam perencanaan penganggaran (Anggota TAPD) agar dapat menyesuaikan porsi kegiatan sesuai dengan *science based policy*;
7. Dibuat SOP atau surat edaran perihal batasan/kriteria topik mengenai kajian yang bisa dilakukan oleh BAPPERIDA sebagai *leading sector* penelitian dan PD terkait.

Efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis melalui perbandingan antara capaian kinerja (output/outcome) dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun dukungan sistem, yang terdiri dari :

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia
2. Penguatan sistem monitoring proses publikasi berbasis timeline
3. Efektivitas dan Efisiensi dalam Penggunaan Biaya (*Cost-Effectiveness*)

Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi yang Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 dan Indikator Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi dan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Tahun 2025 didukung oleh satu program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan adalah sebesar **12,38%** atau setara Rp **295.340.790,-.** Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar **Rp. 2.386.280.200** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.090.939.410,-.**

Dalam mencapai keberhasilan kinerja pada indikator Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi dan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan pada Tahun 2025 ditunjang oleh 1 (satu) program, 4 (empat) kegiatan, 9 subkegiatan. Realisasi kinerja kegiatan dan subkegiatan sudah mencapai 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Berikut ini merupakan intergrasi sasaran strategis, indikator kinerja, program dan kegiatan Bapperida Tahun 2025 yang mendukung pada capaian kinerja persentase hasil riset yang masuk dalam jurnal terakreditasi dan persentase produk inovasi yang dimanfaatkan tahun 2025 :

Tabel 3.27
Matriks Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Bapperida Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		(%)
			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Memperkuat Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi yang Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi dan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	- Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplemen-tasikan - Persentase hasil inovasi yang diimplemen-tasikan	66,5 66,5	% %	100 50,6	% %	75, 3
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggara-an pemerintahan dan pengkajian peraturan	100	%	100	%	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		(%)
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100	%	100	%	100
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100	%	100	%	100
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	100	%	100	%	100

Sumber: Pengolahan data Bapperida Desember 2025

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025 **Rp. 32.423.437.072,39** dengan realisasi sebesar **Rp. 28.517.739.509,00-** atau capaian **87,95%** dan efisiensi sebesar **12,05%**. Ringkasan laporan realisasi anggaran yang mendukung dalam setiap pencapaian kinerja sasaran strategis Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28
Matriks Capaian Indikator Kinerja dengan Capaian Realisasi Keuangan Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bapperida	84,55 Poin	86,05 Poin	101,77	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**- Nilai AKIP - Persentase BMD dalam kondisi baik**	**23.881.163.572,39**	**21.115.716.633**	**88,42**	**11,58**
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**206.431.500**	**190.735.110**	**92,40**	**7,60**
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.620.000	73.249.810	87,60	12,40

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.362.700	3.362.400	99,99	0,01
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.362.700	3.362.200	99,99	0,01
						Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.057.000	2.997.000	98,04	1,96
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.057.000	2.997.000	98,04	1,96

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	2.730.600	91,02	8,98
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.927.100	12.132.500	87,11	12,89
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	75.640.000	75.326.600	99,59	0,41
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	17.405.000	14.577.000	83,75	16,25
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**16.005.081.729**	**13.897.705.979**	**86,83**	**13,17**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15.978.923.829	13.875.704.779	86,84	13,16
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.179.000	2.894.700	91,06	8,94
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.937.000	2.500.000	85,12	14,88
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.900.000	2.692.800	92,86	7,14
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.651.900	12.556.700	80,22	19,78

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.490.000	1.357.000	91,07	8,93
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai Ketentuan**	**6.193.800**	**4.716.900**	**76,16**	**23,84**
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.421.300	2.592.900	75,79	24,21
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.772.500	2.124.000	76,61	23,39
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat Waktu**	**623.760.000**	**303.865.500**	**48,72**	**51,28**
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31.500.000	31.468.500	99,90	0,10

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.115.000	1.985.000	63,72	36,28
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.500.000	2.406.000	68,74	31,26
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	31.335.000	26.140.000	83,42	16,58
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	554.310.000	241.866.000	43,63	56,37
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**2.335.221.950,39**	**2.297.793.466**	**98,40**	**1,60**
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50.000.000	38.595.075	77,19	22,81

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.789.016.200,39	1.782.124.161	99,61	0,39
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	134.032.900	132.617.801	98,94	1,06
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70.000.000	69.524.730	99,32	0,68
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24.198.000	23.947.900	98,97	1,03
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13.998.400	9.720.500	69,44	30,56
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	64.625.000	64.598.600	99,96	0,04
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.351.450	176.664.699	93,30	6,70

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.528.300.000**	**1.524.311.660**	**99,74**	**0,26**
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	664.300.000	663.500.000	99,88	0,12
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	864.000.000	860.811.660	99,63	0,37
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.650.381.103**	**2.408.896.749**	**90,89**	**9,11**
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.030.000	3.026.900	99,90	0,10
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	297.351.103	229.647.177	77,23	22,77

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.350.000.000	2.176.222.672	92,61	7,39
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**	**525.793.490**	**487.691.269**	**92,75**	**7,25**
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	64.600.000	43.687.116	67,63	32,37
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140.940.000	124.898.250	88,62	11,38
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	192.106.000	191.451.000	99,66	0,34

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	128.147.490	127.654.903	99,62	0,38
						Jumlah 1		**23.881.163.572,39**	**21.115.716.633**	**88,42**	**11,58**
						Sekretariat		**7.902.239.743,39**	**7.240.011.854,00**	**91,62**	**8,38**
	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas, dan pencapaian dalam dokumen perencanaan	83,07%	84,57%	101,81	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Capaian nilai PPD**	**2.715.626.600**	**2.370.394.367**	**87,29**	**12,71**
						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan - Persentase berita acara yang disahkan**	**1.605.687.200**	**1.473.863.479**	**91,79**	**8,21**
						Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	354.656.500	307.809.554	86,79	13,21

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	35.588.400	34.796.060	97,77	2,23
						Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	214.268.400	213.614.000	99,69	0,31
						Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	14.348.000	13.234.900	92,24	7,76
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	539.162.000	521.225.100	96,67	3,33
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	447.663.900	383.183.865	85,60	14,40

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanaan di perencanaan pembangunan daerah**	**468.309.400**	**359.882.835**	**76,85**	**23,15**
						Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	103.943.500	102.732.400	98,83	1,17
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	244.755.400	137.565.645	56,21	43,79
						Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	119.610.500	119.584.790	99,98	0,02

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik**	**548.971.600**	**487.049.053**	**88,72**	**11,28**
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	208.927.900	199.880.300	95,67	4,33
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	340.043.700	287.168.753	84,45	15,55
						Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	**Persentase ketersediaan dokumen SIPD**	**92.658.400**	**49.599.000**	**53,53**	**46,47**
						Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	92.658.400	49.599.000	53,53	46,47

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
		Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran	100%	100%	100	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**- Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD** **- Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD** **- Persentase muatan RKA dengan RKPD**	**3.440.366.700**	**2.940.689.099**	**85,48**	**14,52**
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** **2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** **3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**907.019.600**	**763.007.641**	**84,12**	**15,88**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	329.755.500	304.613.794	92,38	7,62
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	43.134.000	30.618.000	70,98	29,02
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	54.414.800	48.624.599	89,36	10,64
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	387.024.500	297.589.603	76,89	23,11

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	49.392.600	46.629.800	94,41	5,59
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	43.298.200	34.931.845	80,68	19,32
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA** **2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA**	**1.174.781.700**	**1.016.099.328**	**86,49**	**13,51**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
							3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA				
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	234.363.900	183.770.334	78,41	21,59
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	304.862.300	277.099.234	90,89	9,11
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	99.616.215	85.581.215	85,91	14,09

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	150.205.300	147.934.750	98,49	1,51
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	168.104.200	156.533.695	93,12	6,88
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	217.629.785	165.180.100	75,90	24,10

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** **2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** **3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**1.358.565.400**	**1.161.582.130**	**85,50**	**14,50**
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	286.897.800	217.082.920	75,67	24,33

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	85.844.000	82.521.700	96,13	3,87
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	661.919.400	558.786.960	84,42	15,58
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	174.675.200	154.484.950	88,44	11,56
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	79.327.000	79.326.800	100	0

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	69.902.000	69.378.800	99,25	0,75
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang dimplementasikan	66,5%	75,3%	113,23	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**- Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan** **- Persentase hasil inovasi yang diimplementasi Kan**	**2.386.280.200**	**2.090.939.410**	**87,62**	**12,38**
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**269.796.000**	**269.426.700**	**99,86**	**0,14**
						Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	269.796.000	269.426.700	99,86	0,14

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Persentase ketersediaan Dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan**	**349.840.000**	**173.143.883**	**49,49**	**50,51**
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	349.840.000	173.143.883	49,49	50,51
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Persentase ketersediaan Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan**	**514.104.500**	**446.151.835**	**86,78**	**13,22**
						Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	34.725.000	6.710.500	19,32	80,68
						Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	129.919.500	125.709.105	96,76	3,24

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	175.000.000	173.971.000	99,41	0,59
						Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	24.280.000	23.581.000	97,12	2,88
						Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	150.180.000	116.180.230	77,36	22,64
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Persentase ketersediaan Dokumen pengembangan Inovasi dan teknologi**	**1.252.539.700**	**1.202.216.992**	**95,98**	**4,02**
						Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	852.925.000	845.877.948	99,17	0,83

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Urusan	Indikator	Anggaran (Rp)			% Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	399.614.700	356.339.044	89,17	10,83
						JUMLAH 2		**8.542.273.500,00**	**7.402.022.876,00**	**86,65**	**13,35**
						TOTAL		**32.423.437.072,39**	**28.517.739.509,00**	**87,95**	**12,05**

Sumber: Capaian Kinerja Bapperida Tahun 2025

Jika dibandingkan rerata capaian kinerja Bapperida Tahun 2025 adalah sebesar **110,83%** dengan capaian realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar **87,95%** dengan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar **12,05%.**

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*performing goverment)* Renstra 2025-2029 Bapperida Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator tujuan dan 3 (tiga) indikator sasaran, disimpulkan bahwa:

Tujuan strategis Bapperida Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Memperkuat Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan, dengan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut: (1). Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) sebesar **103,16%**; (2). Persentase Kebijakan Berbasis Bukti sebesar **114,05%**.

Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian indikator kinerja: (1) Indeks SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja sebesar **99,92%**;.

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi yang Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan capaian indikator kinerja: (1). Persentase Hasil Riset yang Masuk dalam Jurnal Terakreditasi sebesar **113,75%**; (2). Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan sebesar **123,28%**.

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di Bapperida Kabupaten Bandung secara umum sudah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di Bapperida Kabupaten Bandung tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, riset dan inovasi.

4.2. Langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Bapperida

Langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan Bapperida Kabupaten Bandung dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan kedepan antara lain:

1. Adanya komitmen pimpinan dan jajaran dalam menyelesaikan dokumen tepat waktu dengan cara membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mengefisiensikan pekerjaan yang bersamaan dilakukan;

2. Memaksimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
3. Menentukan prioritas pembangunan dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan RPJMD;
4. Melaksanakan forum bagi peneliti sehingga dapat mendapatkan kesempatan untuk mendesiminasikan hasil penelitian dan kajiannya;
5. Peningkatan kualitas data baik dalam hal validasi data, keterbukan sumber data serta kesesuaian dengan indikator kinerja;
6. Menerapkan budaya manajemen risiko dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun 2026.
7. Mengintegrasikan aplikasi sidalmonep dengan aplikasi lainnya dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan.